



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT DAN *GENDER*  
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA TAHUN 2008-2010**

**SKRIPSI**

**WENDY BUDIANTO**

**1006815322**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT DAN *GENDER*  
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA TAHUN 2008-2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi**

**WENDY BUDIANTO**

**1006815322**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wendy Budianto

NPM : 1006815322

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh.

Nama : Wendy Budianto

NPM : 1006815322

Program Studi : Akuntansi

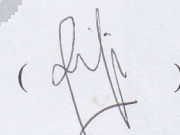
Judul Skripsi

\*) Indonesia : **PENGARUH OPINI, TEMUAN AUDIT DAN GENDER TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2008-2010.**


\*) Inggris : **THE EFFECT OF OPINION, FINDING THE AUDIT AND GENDER TO PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA YEAR 2008-2010**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi**, pada **Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**.

### DEWAN PENGUJI

KETUA : Rahfiani Khairurizka, S.E., Ak., M.Acc (  )

PEMBIMBING : Debby Fitriasari, S.E., MSM

ANGGOTA PENGUJI : Dahlia Sari, S.E., M.Si (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 juli 2012

Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi,

Sri Nuhayati, S.E., MM., S.A.S

NIP : 19600317 198602 2001



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wendy Budianto  
NPM : 1006815322  
Program Studi : Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

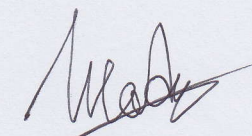
**Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 - 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 9 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Wendy Budianto)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Debby Fitriasari, SE, MSM, sebagai pembimbing dan anggota tim penguji yang telah begitu sabar dan teliti serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Rahfiani Khairurizka, S.E., Ak., M.Acc dan Ibu Dahlia Sari, S.E, M.Si, sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama Penulis menimba ilmu di Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Kedua Orang tua (Bpk. Muhammad Sudibyo dan Ibu Trisni Budiatiningsih), kakak dan kakak ipar (Rendy Avianto, SE dan Distya Rini Suparko, SE) dan adik (Cindy Saraswaty, SE, Dendy Ferdianto, Sendy Sudibyo) terima kasih atas doa, semangat, kesabaran dan perhatian yang tidak pernah habis untukku.
5. Pacarku tersayang, Drg. Tanty Triana yang telah mendukung dan membantu saya dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Ekstensi, Ghani, Dika, Bari, JB, Jurek, Nono, Windut, Arin, Fauzah Avivi, Eva, Nci, Bacil, Mone, Bowo, Aldi, Widi, Ondi (si kawan) dan Cobra's yang telah berjuang bersama. Serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semangat, insyaAllah kita pasti bisa.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Depok, 9 Juli 2012

Wendy Budianto

## ABSTRAK

Nama : Wendy Budianto  
NPM : 1006815322  
Program Studi : Strata 1 Akuntansi  
Judul : Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 – 2010.

Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukkan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pemda dengan pemimpin wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

Kata kunci : Pemerintah daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), opini audit, temuan audit, gender.

## ABSTRACT

Name : Wendy Budianto  
NPM : 1006815322  
Study Program : Bachelor Degree of Accounting  
Titile : The Effect of Opinion, Finding The Audit And Gender to Performance of Local Government In Indonesia Year 2008-2010.

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local government size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local government. While the government with women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores.

Key word :

Local government, Government implementation report (LPPD), Evaluation of Local Government (EKPPD), Performance score, Audit opinion, Finding the audit, Gender.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN LITERATUR</b>	
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	11
2.1.1 Definisi.....	11
2.1.2 Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.....	12
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).....	12
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	14
2.2 Kinerja Pemerintah Daerah.....	16
2.2.1 Definisi Kinerja.....	16
2.2.2 Pengukuran Kinerja dan Manfaat Pengukuran Kinerja.....	16
2.2.3 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).....	17
1 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)..	17
2 Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah(EKPOD) .	20
3. Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).....	20
2.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan.....	20
2.3.1 Jenis Pemeriksaan.....	21
2.3.2 Opini Pemeriksaan Keuangan.....	22

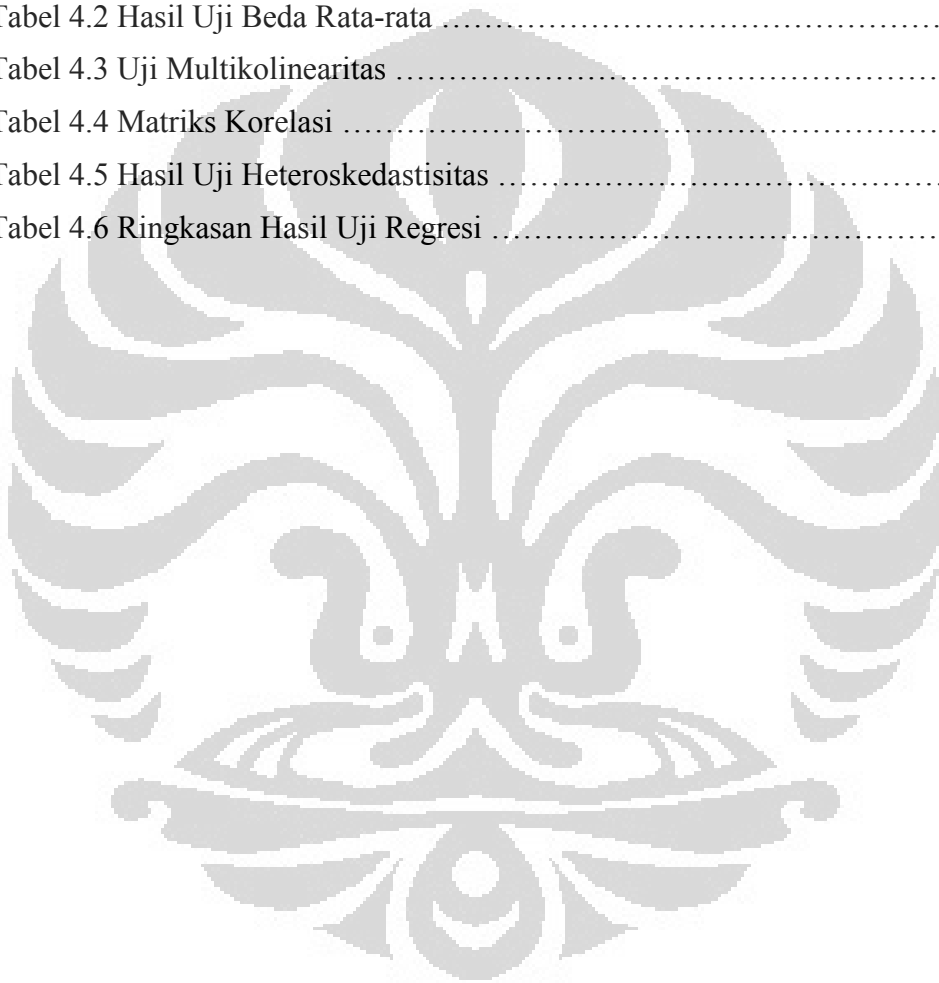
2.3.3 Temuan Audit .....	23
2.4 Gender .....	26
2.5 Penelitian Sebelumnya .....	27
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Kerangka Penelitian .....	29
3.2 Hipotesis Penelitian .....	31
3.2.1 Opini Audit .....	31
3.2.2 Temuan Audit .....	32
3.2.3 Gender .....	32
3.3 Model Penelitian .....	33
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	34
3.4.1 Variabel Dependen .....	34
3.4.2 Variabel Independen .....	34
1 Opini Audit .....	34
2 Temuan Audit .....	34
3 Gender .....	34
3.4.3 Variabel Kontrol .....	34
1 Tingkat Kemandirian Pemda .....	34
2 Ukuran Pemda .....	35
3.5 Pemilihan Sampel serta Sumber Data .....	35
3.5.1 Pengambilan Sampel .....	35
3.5.2 Data .....	36
3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis .....	36
3.6.1 Uji Normalitas .....	36
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	37
1 Multikolinieritas .....	37
2 Heterokedastisitas .....	38
3 Auto Korelasi .....	38
3.6.3 Uji Model Regresi .....	38
1 Uji F-statistik .....	38
2 Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .....	38
3 Uji T-statistik .....	39
<b>BAB 4 ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Statistik Deskriptif Sampel .....	40
4.1.1 Variabel Dependen .....	40
4.1.2 Variabel Independen .....	42

4.1.2.1 Opini Audit .....	42
4.1.2.2 Temuan Audit .....	42
4.1.2.3 Gender .....	44
4.1.3 Variabel Kontrol .....	44
4.1.3.1 Tingkat Kemandirian Pemda .....	44
4.1.3.2 Ukuran Pemda .....	44
4.2 Uji Beda Rata-rata .....	45
4.3 Uji Normalitas .....	46
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	46
4.4.1 Uji Multikolinearitas .....	46
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	48
4.4.3 Uji Auto Korelasi .....	48
4.5 Uji Hipotesis .....	48
4.5.1 Uji Signifikansi Serentak (F-test) .....	49
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	49
4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (t-test) .....	50
4.5.3.1 Variabel Independen .....	50
1 Opini Audit .....	50
2 Temuan Audit .....	50
3 Gender .....	51
4.5.3.2 Variabel Kontrol .....	51
1 Tingkat Kemandirian Pemda .....	51
2 Ukuran Pemda .....	51
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk penelitian selanjutnya .....	53
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	60



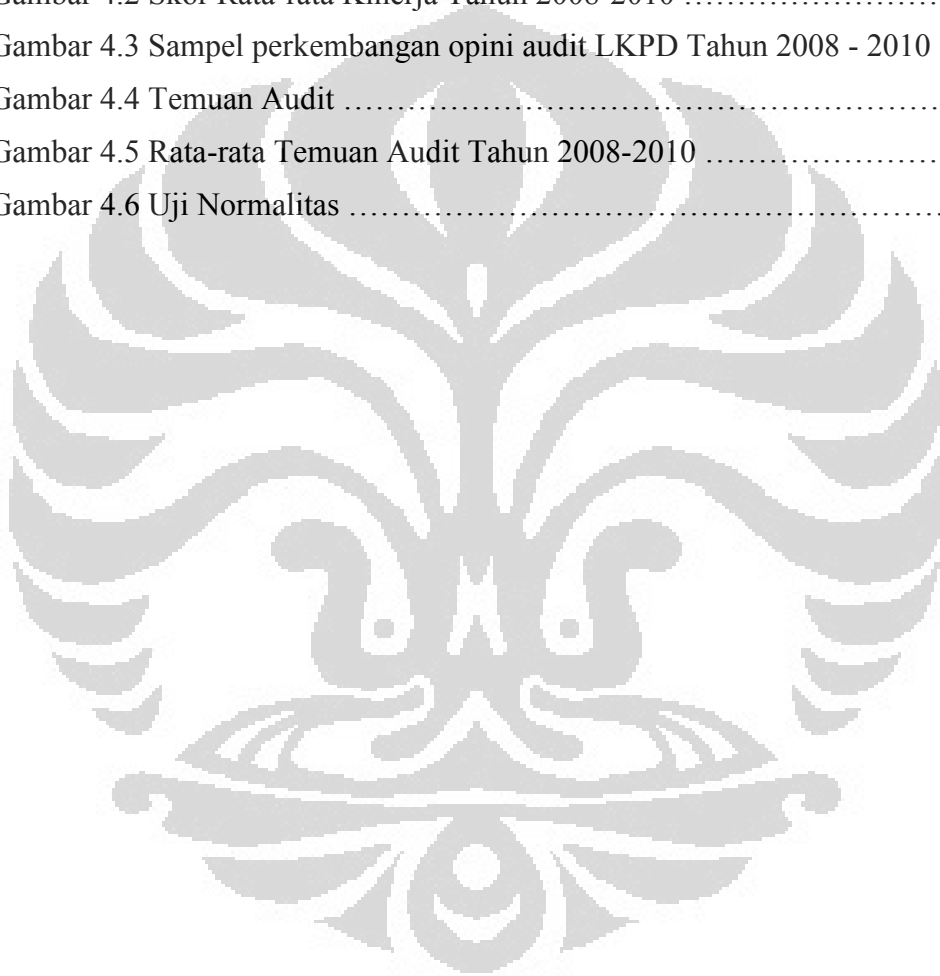
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Tahun 2006-2010 .....	3
Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Desentralisasi .....	13
Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian .....	35
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel .....	36
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-rata .....	45
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas .....	47
Tabel 4.4 Matriks Korelasi .....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Uji Regresi .....	49



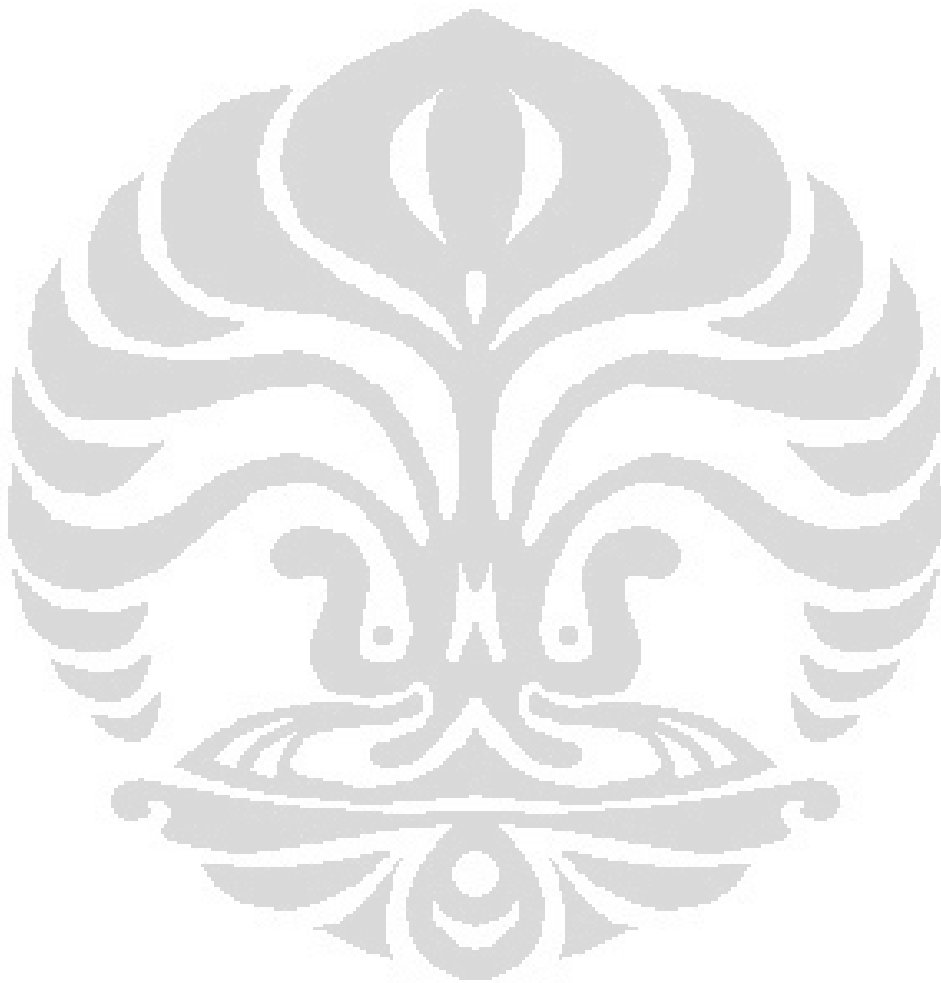
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Temuan Audit BPK atas Pemda Kabupaten/Kota tahun 2008-2010 atas Sistem Pengendalian Intern .....	4
Gambar 1.2 Temuan Audit BPK atas Pemda Kabupaten/Kota tahun 2008-2010 atas Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	4
Gambar 3.1 Kerangka Model Penelitian .....	30
Gambar 4.1 Skor Kinerja Pemda .....	41
Gambar 4.2 Skor Rata-rata Kinerja Tahun 2008-2010 .....	41
Gambar 4.3 Sampel perkembangan opini audit LKPD Tahun 2008 - 2010 .....	42
Gambar 4.4 Temuan Audit .....	43
Gambar 4.5 Rata-rata Temuan Audit Tahun 2008-2010 .....	43
Gambar 4.6 Uji Normalitas .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Pembobotan EKPPD .....	60
Lampiran 2 Daftar Pemda .....	66





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (UU No. 22/1999) tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memulai babak baru dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah (Pemda) selain memiliki kewenangan mengatur daerah juga dituntut memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, serta mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. LPPD merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. LPPD harus mencakup informasi-informasi yang memadai dan akurat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa evaluasi penyelenggaraan Pemda terdiri dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) mengenai Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi

pencapaian kinerja pada tataran pengambil dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain menggunakan LPPD, EKPPD juga menggunakan sumber informasi yang lain, salah satunya adalah informasi yang terkait dengan keuangan daerah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD tersebut, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lebih lanjut, UU No. 15/2004 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan atas hasil pemeriksaan keuangan tersebut akan memuat opini atas laporan keuangan suatu Pemda. Dalam penjelasan UU No. 15/2004 pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Perkembangan opini Pemda kabupaten/kota di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan seperti terlihat pada Tabel 1.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Pemda yang mendapatkan opini WTP dan WDP mulai tahun 2006 – 2010. Dengan adanya peningkatan tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin banyak Pemda yang telah melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangannya sesuai dengan SAP.

**Tabel 1.1. Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2010**

Tahun	OPINI								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1	302	70	28	6	105	23	430
2007	1	1	262	60	56	13	115	26	436
2008	13	3	299	66	30	4	110	24	452
2009	14	3	306	65	47	10	103	22	471
2010	28	6	319	66	26	5	110	22	483

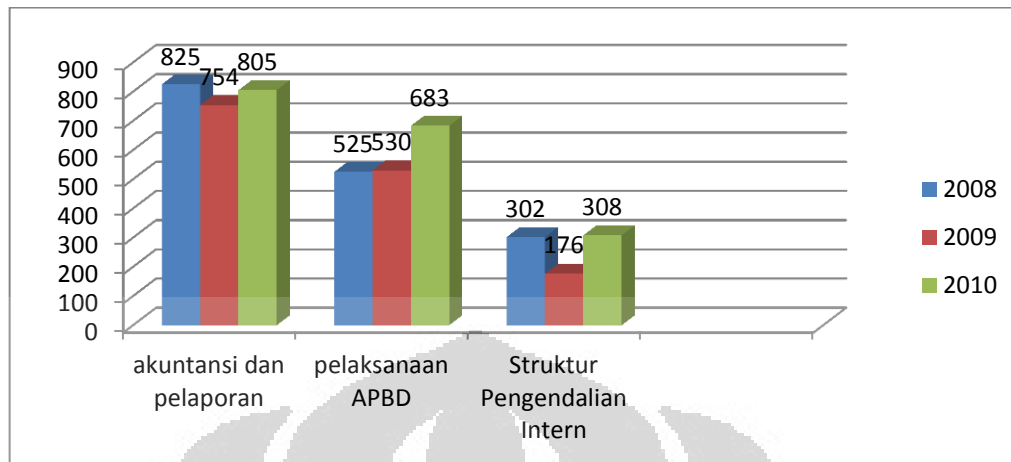
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2011 BPK

Berdasarkan hasil evaluasi BPK terhadap LKPD yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2011, ditemukan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan, pengendalian internal yang efektif, serta kecukupan pengungkapan (*full disclosure*). Sedangkan LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW membuktikan bahwa masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku (Budiartha, 2008).

Berdasarkan UU No. 15/2004, hasil pemeriksaan BPK selain dari opini audit juga dapat berupa temuan audit. Hasil pemeriksaan BPK atas temuan audit dibagi menjadi dua yaitu temuan audit atas sistem pengendalian intern dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Temuan audit atas pengendalian intern ada tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian intern. Sedangkan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan terdapat lima klasifikasi temuan yaitu temuan indikasi kerugian negara, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan ketidakhematan dan efisiensi, dan temuan efektivitas.

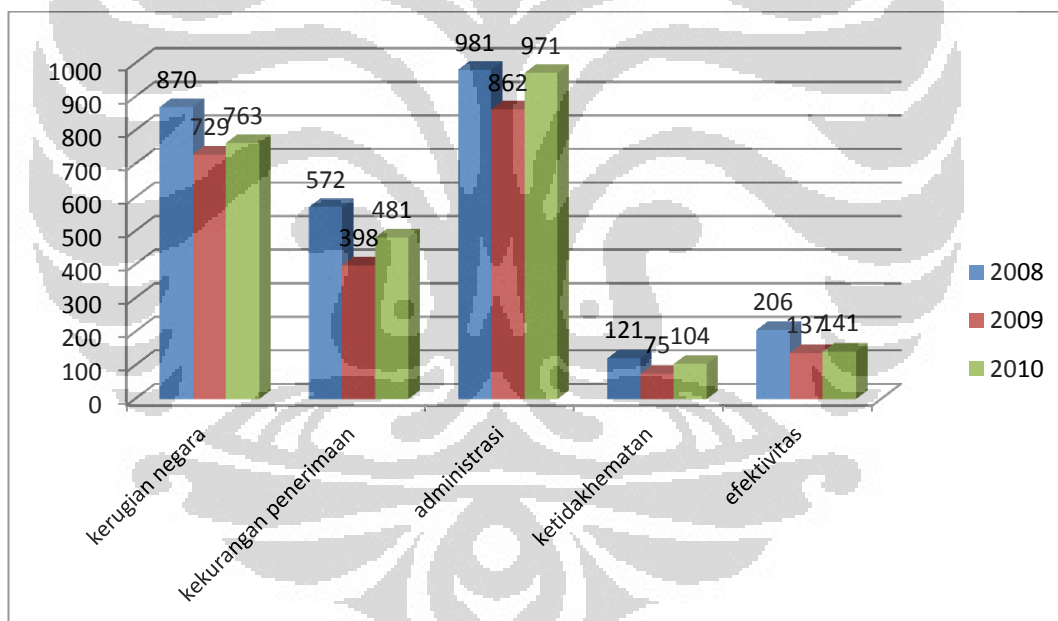


**Gambar 1.1 Temuan Audit BPK atas Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2008-2010 atas Sistem Pengendalian Intern.**



sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2011 BPK

**Gambar 1.2 Temuan Audit BPK atas Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2008-2010 atas Ketidapatuhan Terhadap Perundang-undangan.**



sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2011 BPK

Berdasarkan Gambar 1.1 dan 1.2 di atas, terdapat 825 kasus kelemahan akuntansi dan pelaporan pada temuan audit atas sistem pengendalian intern pada tahun 2008 kemudian menurun di tahun 2009 menjadi 754 kasus dan meningkat kembali menjadi 805 kasus di tahun 2010. Sedangkan jumlah kasus pelaksanaan APBD dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan. Namun pada struktur pengendalian intern dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan

jumlah kasus dari 302 menjadi 170 kasus kemudian tahun 2010 meningkat menjadi 308 kasus. Sedangkan untuk Temuan Audit atas Ketidapatuhan terhadap Perundang-undangan, jumlah kasus pada kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan efektivitas dari tahun 2008 sampai 2009 terjadi penurunan angka namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai kerugian negara dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan nilai kekurangan penerimaan dan nilai efektivitas yang mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai 2009 dan meningkat di tahun 2010. Untuk nilai ketidakhematan mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2010.

Sampai saat ini penelitian di Indonesia yang dilakukan dengan objek penelitian sebagian besar Pemda hanya berdasarkan pada laporan keuangan (Sumarjo, 2010; Rusydi, 2010 dan Cahya, 2010). Sedangkan untuk penelitian yang menggunakan variabel opini audit dan temuan audit masih jarang dilakukan.

Penelitian terkait opini terhadap Pemda belum banyak dilakukan di Indonesia dan kebanyakan hanya bersifat deskriptif. Sari *et al.* (2010) mereview laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian tahun 2006 - 2008. Sedangkan Budiarta (2008) melakukan analisis penelusuran opini auditor independen atas LKPD pemerintah provinsi Bali tahun 2004 - 2005. Penelitian yang bersifat empiris mengenai opini terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh Meiden (2008) yang menemukan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu Li *et al.* (2009) juga membuktikan bahwa opini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan yang dilihat dari *return* perusahaan (ROE).

Jika dikaitkan dengan perusahaan di sektor swasta, opini auditor tidak wajar dan tidak memberikan pendapat merupakan opini yang menggambarkan kinerja manajemen kurang baik, sehingga tidak menutup kemungkinan manajemen akan diganti. Berbeda halnya dengan pemimpin daerah, karena proses penggantian pemimpin daerah lebih banyak disebabkan oleh berlalunya waktu dan unsur politik (Budiarta, 2008). Jika saja masyarakat sekarang ini semakin kritis, tidak menutup kemungkinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemimpin daerah. Oleh sebab itu,

pada dasarnya laporan keuangan swasta maupun Pemda dianggap baik apabila mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian.

Penelitian terhadap temuan audit yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) menemukan bahwa ukuran Pemda, tingkat kekayaan, ketergantungan pemerintah pusat berpengaruh positif sedangkan belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Pengendalian intern (*internal control*) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sering diidentikkan dengan pengendalian akuntansi dan keuangan karena frekuensi pelanggaran dan besarnya kerugian yang ditimbulkan lebih signifikan terjadi di bidang ini.

Zaelani (2010) juga melakukan penelitian terhadap temuan audit atas sistem pengendalian intern pemerintah tahun 2008. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa banyak terdapat kelemahan yang ditemukan di setiap pemerintah daerah. Umumnya, kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan di lembaga pemerintahan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, dan kecurangan yang biasa dilakukan di mulai dari tahap penyusunan anggaran sampai kecurangan dalam pengadaan barang. Menurut Wilopo (2006) dalam Zaelani (2010) pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak sebatas pada pengendalian akuntansi dan keuangan saja, tetapi meliputi keseluruhan organisasi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan.

Selain faktor opini dan temuan audit, peneliti juga mencoba melakukan penelitian terhadap peran *gender* dari pemimpin Pemda. *Gender* adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang

berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan (Fakih, 1996 dalam Irwanti, 2011). Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, *gender* merupakan kata benda yang artinya jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan *gender* ini mengasumsikan bahwa perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan pengambilan keputusan yang berbeda pula (Irwanti, 2011).

Saat ini, perbandingan antara pemimpin daerah laki-laki dengan perempuan masih besar perbedaannya. Untuk pemimpin wilayah tingkat I (provinsi), hanya 1 gubernur perempuan dibandingkan 32 gubernur laki-laki. Sementara untuk bupati/walikota, hanya 8 dari sekitar 400 pemimpin daerah tingkat II se-Indonesia. Walau sedikit, namun perempuan pemimpin daerah tersebut sukses dalam memimpin daerahnya. Seperti Rustriningsih, mantan Bupati Kebumen yang sekarang menjabat sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah. Beliau membuka akses langsung kepada masyarakat dan mengambil tindakan segera atas aduan rakyat. Begitu pula dengan Rina Iriani, Bupati Karanganyar. Selama menjabat sebagai bupati, Rina telah berhasil meningkatkan investasi didaerahnya sebesar 7 kali lipat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat hingga 4 kali lipat. Selain itu, pengangguran juga jauh berkurang, di bawah rata-rata nasional, yaitu 5,7% (nasional 7,14%). Dan pada tahun ini, Karanganyar masuk sebagai nominasi sebagai 15 besar kabupaten terbaik se-Indonesia (Kompasiana, 16 April 2011).

Faktor-faktor di atas mendukung Chung dan Monroe (2001) dalam Puspitasari (2011), yang menyatakan bahwa perempuan dapat lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks dibanding laki-laki karena perempuan lebih memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan. Selain itu, dikatakan juga bahwa laki-laki relatif kurang mendalam dalam menganalisis inti dari suatu keputusan dan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria. Riniwati (2008) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa peran pemberdayaan manajer perempuan berpengaruh terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008-2010**”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010?
3. Apakah perbedaan *gender* berpengaruh terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuktikan adanya pengaruh opini auditor terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010.
2. Membuktikan adanya pengaruh temuan audit terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010.
3. Membuktikan adanya pengaruh *gender* terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 – 2010.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Pemerintah pusat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia terutama dalam hal penyelenggaraan kerjanya. Dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.
2. Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kerjanya.

3. Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.
4. Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja Pemda, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap kinerja suatu Pemda kabupaten/kota.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi pemaparan penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu : pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Pada bab ini membahas teori-teori tentang kinerja sektor publik, laporan kinerja Pemda, evaluasi kinerja Pemda, pemeriksaan laporan keuangan dan penelitian sebelumnya.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, dimulai dari kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, model penelitian, operasionalisasi variabel, desain pengambilan dan ukuran sampel serta data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

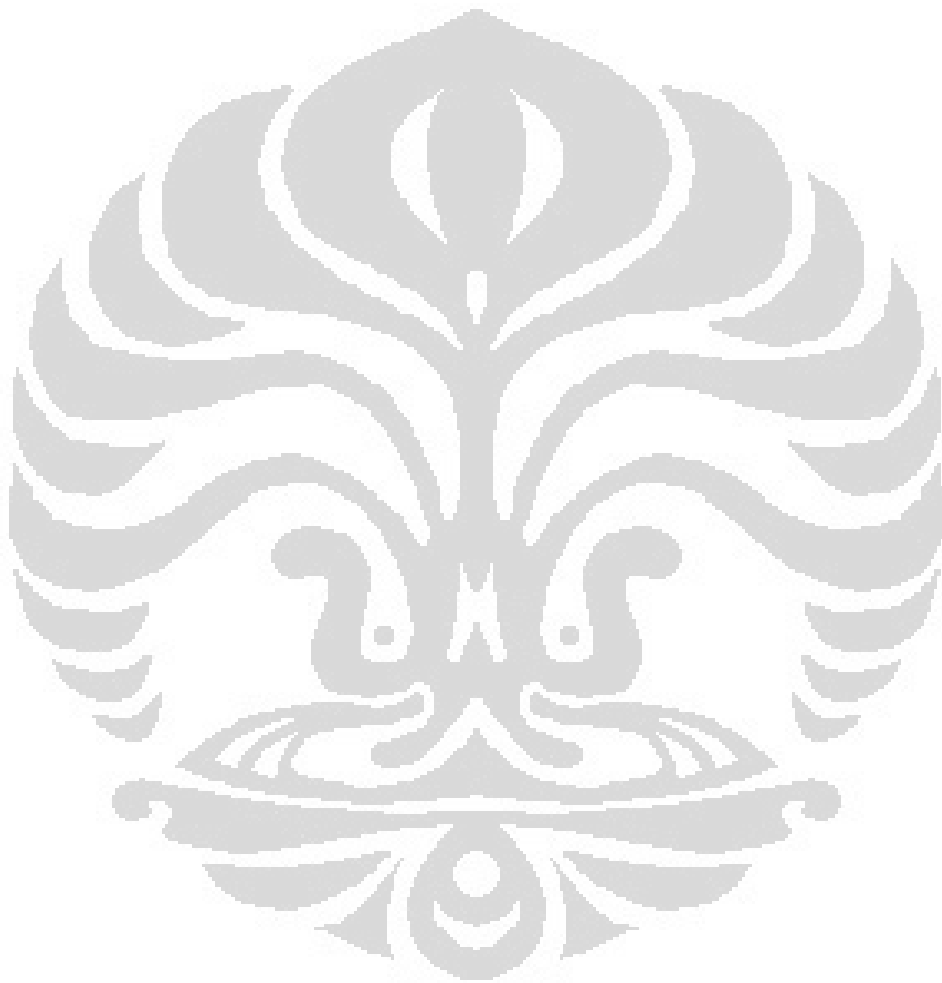
#### **BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari analisis statistik deskriptif dan regresi hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data akan digunakan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan penjelasan mengenai implikasinya.



**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab–bab sebelumnya.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

##### **2.1.1 Definisi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No. 33/2004) yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan atau kepentingan pemerintahan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2009 dalam Rusydi, 2010).

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan dalam bentuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 (PP No. 56/2005) tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemda juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **2.1.2 Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

### **1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang dibuat kepala daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atas hasil penyelenggaraan yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam LPPD harus mencakup informasi-informasi yang memadai dan akurat yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Informasi tersebut harus disajikan secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat melalui media massa yang terdapat di daerah masing-masing tersebut.

Dalam membuat LPPD, pemerintah daerah harus menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga informasi yang dihasilkan tidak bias dan dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pengguna laporan tersebut. Berdasarkan PP No. 3/2007 pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup LPPD dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Urusan Desentralisasi.
- b. Tugas Pembantuan, dan
- c. Tugas Umum Pemerintahan.

Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan-urusan yang dilakukan atas dasar pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap sedangkan urusan pilihan merupakan urusan-urusan yang dilakukan atas dasar adanya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi, dan keunggulan daerah masing-masing. Jenis-jenis urusan wajib dan urusan pilihan menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 (PP No. 38/2007) tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan lebih rinci dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Desentralisasi**

<b>Urusan Wajib</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1.	Pendidikan	14.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.	Kesehatan	15.	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3.	Lingkungan hidup	16.	Perhubungan
4.	Pekerjaan umum	17.	Komunikasi dan informasi
5.	Penataan ruang	18.	Pertanahan
6.	Perencanaan pembangunan	19.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
7.	Perumahan	20.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
8.	Kepemudaan dan olahraga	21.	Pemberdayaan masyarakat desa
9.	Penanaman modal	22.	Sosial
10.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	23.	Kebudayaan
11.	Kependudukan dan catatan sipil	24.	Statistik
12.	Ketenagakerjaan	25.	Kearsipan
13.	Ketahanan pangan	26.	Perpustakaan
<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1.	Kelautan dan perikanan	5.	Pariwisata
2.	Pertanian	6.	Industri
3.	Kehutanan	7.	Perdagangan
4.	Energi dan sumber daya mineral	8.	Ketransmigrasian

Sumber: PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping urusan desentralisasi, ruang lingkup LPPD juga meliputi/mencakup tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.

Sedangkan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

## **2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut PP No. 56/2005, informasi keuangan daerah merupakan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan PP No. 56/2005 pasal 4, informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah harus mencakup :

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- b. Neraca daerah.
- c. Laporan arus kas.
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah.
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi Keuangan Daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.



## **2.2 Kinerja Pemerintah Daerah**

### **2.2.1 Definisi Kinerja**

Pengertian kinerja pemerintah daerah ada bermacam-macam, ada yang mengatakan prestasi atau pelaksanaan. Pada prinsipnya kinerja dapat disimpulkan sebagai kontribusi yang diberikan suatu unit bagi pencapaian tujuan organisasi. Pengertian kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2006) dalam Cahya (2010) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Sedangkan menurut Surat Keputusan LAN No.239/IX/6/8/2003, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

### **2.2.2 Pengukuran Kinerja dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2006), sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan

untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009). Sedangkan Sadjiarto (2000), menyebutkan bahwa manfaat pengukuran kinerja serta informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk :

1. Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu.
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.
3. Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program.
4. Memonitor dan mengevaluasi *results* untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut.
5. Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja.

Dalam pengukuran kinerja Pemda, digunakan istilah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk operasionalisasi evaluasi atas aspek-aspek umum yang disepakati oleh para pengambil kebijakan. IKK menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

### **2.2.3 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)**

EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).
3. Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

#### **1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**

EKPPD merupakan analisis pengumpulan data yang dilakukan terhadap sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dilakukannya

EKPPD berdasarkan PP No. 6/2008 pasal 1 adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan EKPPD, harus berdasarkan dengan asas :

- a. Spesifik : dilaksanakan dengan khusus dan terperinci.
- b. Objektif : dilaksanakan dengan pengukuran kinerja sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- c. Berkesinambungan : dilaksanakan secara bertahap sehingga terlihat proses penyelenggaraan dari waktu ke waktu.
- d. Terukur : dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif.
- e. Dapat diperbandingkan : dilaksanakan dengan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
- f. Dapat dipertanggungjawabkan : dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Berdasarkan asas-asas di atas, sumber informasi utama dari EKPPD adalah dengan menggunakan informasi dari LPPD. Selain menggunakan LPPD, berdasarkan PP No. 6/2008 dan Permendagri No. 73/2009 tentang tata cara pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, EKPPD dapat juga menggunakan sumber informasi pelengkap yang berupa:

- a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Informasi keuangan daerah.
- c. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
- d. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- e. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah.
- f. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus.
- g. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah.
- h. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen.
- i. Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD.

j. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Informasi-informasi di atas berfokus terhadap capaian kinerja terhadap pelaksanaan dan pengambilan kebijakan dengan menggunakan indeks kinerja kunci (IKK). PP No. 6/2008 Pasal 28 dan Permendagri No. 73/2009 Pasal 15-18 menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah. Sistem pengukuran kinerja mencakup:

- a. indikator kinerja kunci (IKK);
- b. teknik pengumpulan data kinerja;
- c. metodologi pengukuran kinerja; dan
- d. analisis, pembobotan dan interpretasi kinerja.

Dalam memberikan penilaian terhadap skor EKPPD, metode yang digunakan adalah dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut meliputi :

- a. Indeks Capaian Kinerja (ICK).
- b. Indeks Kesesuaian Materi (IKM).

Berdasarkan Permendagri No. 73/2009 pasal 22, menjelaskan bahwa metode pemberian skor untuk ICK dan IKM meliputi :

- a. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan :
  1. Penggabungan IKK.
  2. Dilakukan normalisasi data melalui rumus.
  3. Dilakukan rata-rata nilai normalisasi.
  4. Pemberian skor.
- b. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :
  1.  $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
  2.  $> (\text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan  $1,25\%$  rata-rata normal =3
  3.  $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$  sampai dengan rata-rata normal =2
  4.  $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$

- c. Tingkat pemberian skor :
1. Tingkat IKK
  2. Tingkat urusan
  3. Tingkat aspek
  4. Tingkat capaian kinerja
  5. Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk nilai pembobotan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 pada penelitian ini.

## **2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)**

EKPOD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

## **3. Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB)**

EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

### **2.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. LKPD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ditujukan baik terhadap pengelolaan keuangan maupun tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan

kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemerintah daerah wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap periode (tahun) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh auditor independen terlebih dahulu. Dalam hal pemeriksaan keuangan negara, yang bertindak sebagai auditor independen adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006.

### **2.3.1 Jenis Pemeriksaan**

Pada penjelasan UU No. 15/2004 pasal 4, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas:

1. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut yaitu berupa opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Hasil pemeriksaan tersebut memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Hasilnya berupa kesimpulan dari pemeriksa.



### 2.3.2 Opini Pemeriksaan Keuangan

Berdasarkan UU No. 15/2004 pasal 16, Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah disajikan dalam bentuk opini. Dalam penjelasan UU No. 15/2004 dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*).

Opini Wajar Dengan Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Jika auditor menemukan kondisi-kondisi berikut ini maka auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian pada laporan audit:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- d. Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*).

Opini Tidak Wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Opini Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

### 2.3.3 Temuan Audit

Berdasarkan UU No. 15/2004 dan IHPS BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Pencatatan tidak/belum dilakukan dengan akurat.
  - b. Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
  - c. Keterlambatan penyampaian laporan.
  - d. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  - a. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
  - b. Kegiatan yang tidak sesuai aturan.
  - c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.
  - e. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
  - a. Tidak memiliki SOP yang formal.
  - b. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal.
  - c. Tidak adanya satuan pengawasan intern.
  - d. Satuan pengawasan intern yang ada tidak memadai.
  - e. Tidak ada pemisahan tugas.

Sedangkan untuk rincian dari lima klasifikasi temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara
  - a. Belanja fiktif.
  - b. Tuntutan perbendaharaan.
  - c. Kemahalan harga (*mark up*): pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.
  - d. Kelebihan pembayaran.
  - e. Kekurangan volume pekerjaan.
  - f. Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.
  - g. Indikasi tindak pidana korupsi.
  - h. Pengadaan barang/jasa fiktif.
  - i. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi).
  - j. Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi.
  - k. Aset dikuasai pihak lain.
  - l. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
2. Klasifikasi Temuan Kekurangan Penerimaan
  - a. Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)/denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/diseter.
  - b. Penggunaan langsung PNPB/Pendapatan (Retribusi, kapitasi ASKES, dll).
  - c. Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) akhir tahun anggaran tidak diseter/belum ke kas negara/kas daerah.
  - d. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemeruintah.
3. Klasifikasi Temuan Administrasi
  - a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.

- b. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah).
  - c. Proses pengadaan barang/jasa/lelang proforma.
  - d. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
  - e. Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNPB tidak sesuai ketentuan.
  - f. Pengalihan anggaran antara MAK (Mata Anggaran Keluaran)/pengeluaran tidak sah.
  - g. Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
  - h. Salah pembebanan anggaran.
  - i. Kebijakan tidak tepat.
  - j. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi objek yang diperiksa.
  - k. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah (Aset belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak sesuai ketentuan).
  - l. Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan APBN/APBD
4. Klasifikasi Temuan Kehematan dan Efisiensi
- a. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan.
  - b. Penetapan harga standar tidak realistis.
  - c. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar.
  - d. Ketidakehematan/pemborosan keuangan negara.
5. Klasifikasi Temuan Efektivitas
- a. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan.
  - b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  - c. Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan.
  - d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
  - e. Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

## 2.4 Gender

Sejarah perbedaan *gender* antara pria dan wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Perbedaan konsep *gender* secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya *gender* telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas (Sifajaya, 2011).

Terdapat teori yang menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yaitu teori *selectivity hypothesis*. Teori tersebut didasarkan pada perbedaan isu *gender* dalam pemrosesan informasi dan pembuatan keputusan yang didasarkan atas pendekatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pemrosesan inti informasi guna memecahkan masalah dan membuat inti keputusan (Meyers-Levy, 1986 dalam Zulaikha, 2006). Menurut teori ini, perempuan akan melakukan strategi pengolahan informasi yang berbeda tergantung pada kompleksitas tugas. Perempuan cenderung menggunakan strategi pengolahan informasi yang terperinci tanpa melihat apakah tugas itu sifatnya sederhana atau kompleks. Sedangkan laki-laki cenderung untuk menyederhanakan strategi pengolahan yang dapat meminimalkan usaha kognitif (*cognitive effort*) dan mengurangi beban informasi untuk penugasan yang sederhana, dan mengalihkan ke strategi yang lebih terperinci hanya jika kompleksitas tugas tidak dapat diakomodasi oleh pendekatan yang sederhana.

Pandangan mengenai *gender* dapat diklasifikasikan ke dalam *Sex Role Stereotypes* dan *Managerial Stereotypes* (Palmer dan Kandasami, 1997 dalam Irwanti, 2011). *Sex Role Stereotype* adalah suatu keyakinan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kemauan yang berbeda sehingga perlu ada perbedaan dalam mengelola dan cara menilai, mencatat, serta mengkombinasikan untuk menghasilkan sinergi. Secara umum dipersepsikan bahwa laki-laki lebih berorientasi pada pekerjaan, lebih obyektif, lebih independen, dan pada umumnya mempunyai kemampuan lebih dari pada perempuan dalam pertanggungjawaban manajerial. Perempuan di lain pihak dipandang lebih pasif, lebih lembut, lebih berorientasi pada pertimbangan, lebih sensitif dan lebih rendah posisinya pada

pertanggungjawaban dalam organisasi dibandingkan laki-laki (Kreitner dan Kinichi, 2004 dalam Narsa, 2006). Sedangkan *Manajerial Stereotype* menjelaskan bahwa manajer yang sukses adalah seseorang yang memiliki sikap, perilaku, dan temperamen yang umumnya lebih dimiliki laki-laki dibandingkan perempuan (Palmer dan Kandasami, 1997 dalam Narsa, 2006). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chung and Monroe (2001) dalam Puspitasari (2011) yang menyatakan bahwa perempuan dapat lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks dibanding laki-laki dikarenakan perempuan lebih memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan.

## 2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan terhadap Pemda sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia, namun sebagian besar penelitian yang dilakukan tersebut hanya berdasarkan pada laporan keuangan Pemda. Rusydi (2010) meneliti kinerja keuangan tahun anggaran 2006 - 2008 dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari belanja daerah. Pendekatan kedua meneliti pengaruh Belanja Daerah, Daya Pajak dan DAU atas kinerja keuangan yang dilihat dari PAD. Hasil penelitian membuktikan bahwa DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah serta belanja daerah dan DAU berpengaruh positif terhadap PAD. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang meneliti pengaruh karakteristik Pemda kabupaten/kota terhadap kinerja keuangan Pemda tahun 2008. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ukuran daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda yang dilihat dari rasio efisiensi.

Di luar negeri, penelitian mengenai kinerja Pemda yang dilihat dari rasio efisiensi dilakukan oleh Lin *et al.* (2010) yang meneliti pengaruh pendapatan Pemda, impor, ekspor, GDP, dan *incomes of family* terhadap kinerja ekonomi di Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di Cina untuk tahun 2005 dan 2006. Sedangkan Coll *et al.* (2006) meneliti pengaruh *tax*, *transfer*, Pendapatan Daerah, *leverage*, dan belanja daerah

terhadap kinerja Pemda di Spanyol (rasio efisiensi). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hanya DAU dan *leverage* yang berpengaruh terhadap rasio efisiensi Pemda di Spanyol untuk tahun 1995.

Penelitian yang menggunakan laporan kinerja Pemda belum banyak dilakukan di Indonesia dan kebanyakan bersifat deskriptif. Dalimunthe (2010) mereview evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia dengan objek penelitian Pemkot Medan, Pemkab Wonogiri dan Pemkot Dumai tahun anggaran 2008. Sedangkan Dhuanovawati (2010) melakukan analisis atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh tim evaluasi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008.

Penelitian yang bersifat empiris kuantitatif mengenai laporan kinerja Pemda dilakukan oleh Mustikarini (2012) yang meneliti pengaruh ukuran Pemda, tingkat kekayaan, ketergantungan pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit terhadap skor kinerja Pemda. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran Pemda, tingkat kekayaan, ketergantungan pemerintah pusat berpengaruh positif sedangkan belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian apakah faktor opini, temuan audit serta *gender* dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Untuk opini audit dan *gender*, peneliti menggunakan sumber/acuan dari perusahaan swasta. Untuk opini terhadap kinerja, dilakukan oleh Meiden (2008) terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain Meiden (2008), penelitian lainnya dilakukan oleh Li *et al.* (2009) yang juga membuktikan bahwa opini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan yang dilihat dari *return* perusahaan. Untuk faktor *gender*, dilakukan oleh Riniwati (2008), Hamidah (2011) dan Hanani (2009) terhadap kinerja manajemen. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *gender* dapat mempengaruhi kinerja manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amikawati (2008) dan Setiawati (2008) tidak berhasil membuktikan bahwa *gender* mempunyai pengaruh terhadap kinerja.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Kerangka Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini auditor (BPK) dan temuan audit (BPK) terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah perbedaan *gender* pemimpin Pemda berpengaruh terhadap kinerja Pemda tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, pada pasal 1 menyebutkan bahwa untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sasaran Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah. Sumber utama dari EKPPD adalah dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selain dengan menggunakan LPPD, EKPPD juga dapat menggunakan sumber informasi lainnya, diantaranya adalah dengan menggunakan sumber informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah meliputi Laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Keseluruhan informasi keuangan daerah tersebut termasuk ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disebut sebagai LKPD.

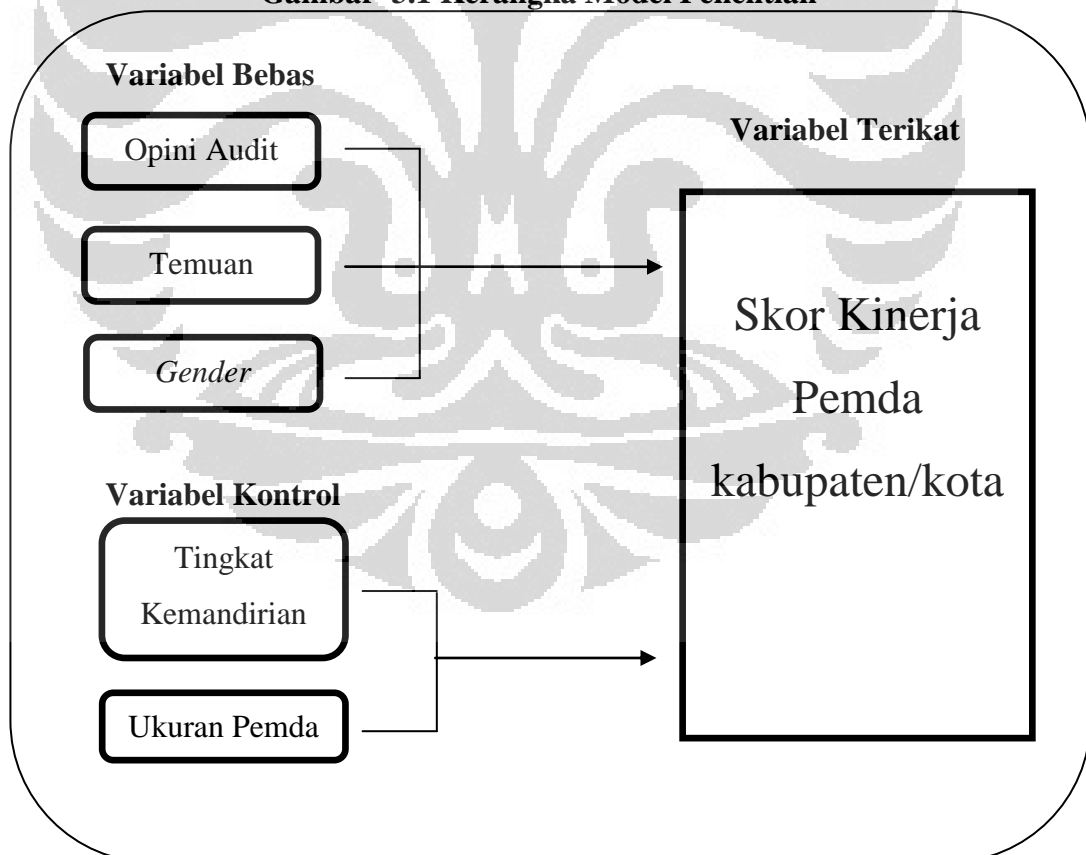
Salah satu masalah yang timbul dalam LKPD adalah timbulnya opini yang dikeluarkan oleh auditor independen dan adanya temuan audit. Opini yang dikeluarkan auditor independen terhadap laporan keuangan diberikan atas 4 kategori yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Laporan keuangan Pemda dianggap baik apabila memperoleh opini WTP dan WDP. Semakin baik opini yang didapat Pemda maka semakin baik kinerja Pemda tersebut. Begitu pula dengan temuan audit yang ditemukan oleh auditor independen, semakin kecil temuan yang ditemukan maka semakin baik pula kinerja Pemda tersebut.



Baik atau buruknya kinerja suatu Pemda juga tergantung dari *gender* seorang pemimpin Pemda tersebut. Dimana pemimpin laki-laki biasanya lebih obyektif dan lebih independen dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan wanita biasanya lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks serta perempuan memiliki kemampuan lebih untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan. Pada dasarnya apabila seorang pemimpin memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin suatu organisasi maka seharusnya kinerja yang dilakukan akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian opini audit (BPK), temuan audit (BPK), peran *gender*, tingkat kemandirian (PAD) dan ukuran pemerintah daerah (TA) akan berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka model dari kerangka penelitian ini dapat disampaikan dalam Gambar 3.1 dibawah ini.

**Gambar 3.1 Kerangka Model Penelitian**



Sumber : Olah data Penulis

## 3.2 Hipotesis Penelitian

### 3.2.1 Opini Audit

Seperti halnya di sektor swasta, laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen dapat saja diberikan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti wajar dengan pengecualian, menolak memberikan pendapat (*disclaimer*) dan pendapat tidak wajar jika auditor memandang laporan keuangan yang dihasilkan secara material menyimpang dari standar yang berlaku. Untuk mendapatkan opini WTP dan WDP ada empat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu pertama kepatuhan terhadap standar akuntansinya, kedua efektivitas pengendalian internal, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan keempat kecukupan pengungkapan (*full disclosure*). Laporan keuangan perusahaan dianggap baik apabila mendapatkan opini WTP dan WDP (Budiartha, 2008).

Dalam laporan keuangan audit, pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya akan berpengaruh terhadap pandangan investor yang akan melihat pendapat auditor tersebut sebagai *good news* atau *bad news*. Terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tidaklah mudah. Diperlukan komitmen dan motivasi dari semua jenjang pegawai mulai dari tingkat bawah sampai pada kepala biro untuk mengacu pada standar, sistem dan prosedur yang telah ada, serta peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada hal-hal yang secara material menyimpang dari standar dan peraturan perundangan yang ada. Dengan demikian, semakin baik opini yang diberikan oleh auditor (BPK) kepada Pemda, maka diharapkan akan semakin baik pula kinerja Pemda tersebut. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Li *et al.* (2009) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit (WTP dan WDP) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Meskipun penelitian dilakukan pada perusahaan swasta, tetapi tetap relevan untuk semua jenis organisasi termasuk pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis pada penelitian ini.

*Hipotesis 1 : Pemda dengan opini WTP dan WDP akan memiliki skor kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda yang mendapatkan opini selain WTP dan WDP.*

### 3.2.2 Temuan Audit

Zaelani (2010) melakukan penelitian terhadap temuan audit atas sistem pengendalian intern pemerintah tahun 2008. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa banyak terdapat temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan di setiap pemerintah daerah. Temuan audit tersebut merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja dilakukan oleh Mustikarini (2012). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda.

Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini adalah:

*Hipotesis 2: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.*

### 3.2.3 Gender

Kaum wanita relatif lebih efisien dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum wanita juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi yang sedikit menjadi lebih tajam (Jamilah *et al.*, 2007). Pada dasarnya, apabila seorang pemimpin memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin suatu organisasi maka seharusnya kinerja yang dilakukan akan menjadi lebih baik. Hanani (2009), Riniwati (2008) dan Hamidah (2011) *gender* dan membuktikan bahwa *gender* (wanita) berpengaruh terhadap kinerja manajer. Hasil penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Amikawati (2008) dan Setiawati (2008). Hasil penelitian tersebut mengatakan bawah *gender* tidak berpengaruh terhadap kinerja manajer. Berdasarkan hal tersebut terhadap variabel gender maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

*Hipotesis 3 : Gender berpengaruh terhadap kinerja Pemda.*

### 3.3 Model Penelitian

Model penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{SKORit} = \beta_0 + \beta_1\mathbf{OPINi} + \beta_2\mathbf{TEMUANi} + \beta_3\mathbf{GENDERi} + \beta_4\mathbf{PADi} + \beta_5\mathbf{TAi} + \varepsilon$$

Keterangan :

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien variabel independen  
 $\varepsilon$  = Koefisien eror

Dalam model penelitian ini, kinerja Pemda (variabel dependen) dilihat dari skor kinerja (**SKOR**) pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2008-2010.

Sedangkan variabel independen dalam model penelitian ini terdiri dari:

1. Opini Audit yang dilihat dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemda (**OPINI**).
2. Temuan audit dilihat dari hasil audit BPK atas laporan keuangan yang berupa nominal rupiah atas total temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (**TEMUAN**).
3. *Gender* merupakan variabel *dummy* dimana 1 adalah pemimpin Pemda perempuan dan 0 adalah pemimpin Pemda laki-laki (**GENDER**)

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan 2 variabel kontrol yaitu :

- Tingkat kemandirian yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan (**PAD**).
- Ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari Ln Total Aset (**TA**)

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD Tahun 2008 – 2010 Tingkat Nasional dengan *range* nilai 0 - 4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portfolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD

tahun 2008 - 2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah.

### 3.4.2 Variabel Independen

#### 1. Opini Audit

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Variabel opini auditor ini berupa variabel *dummy*, dimana untuk laporan keuangan yang mendapatkan WTP dan WDP akan diberi nilai 1 dan laporan keuangan yang mendapatkan selain WTP dan WDP akan diberi nilai 0.

#### 2. Temuan Audit

Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel temuan audit adalah Mustikarini (2012). TEMUAN mengukur seberapa besar porsi temuan audit (dalam rupiah) suatu Pemda atas ketidakpatuhan kepada perundang-undangan dibandingkan dengan total APBD yang diperiksa (total realisasi belanja daerah Pemda).

TEMUAN : temuan audit (dalam rupiah)/total realisasi belanja

#### 3. Gender

Variabel *gender* pada penelitian ini adalah untuk membedakan antara pemimpin Pemda yang perempuan dan laki-laki. Jika pemimpin Pemda tersebut dipimpin oleh perempuan maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika dipimpin oleh laki-laki akan diberi nilai 0.

### 3.4.3 Variabel Kontrol

#### 1. Tingkat Kemandirian Pemda

Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel tingkat kemandirian antara lain Sumarjo (2010), Rusydi (2010) dan Mustikarini (2012). Tingkat kemandirian daerah diukur dengan seberapa besar porsi PAD yang dapat dihasilkan Pemda dibandingkan dengan pendapatan total yang diterima Pemda. Semakin besar nilai PAD/Total pendapatan menunjukkan semakin mandiri Pemda tersebut.

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

$$\text{PAD} = \text{Total PAD} / \text{Total Pendapatan}$$

## 2. Ukuran Pemda

Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel ukuran Pemda antara lain Sumarjo (2010) dan Mustikarini (2012), dengan hasil penelitian bahwa ukuran Pemda mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja Pemda. Ukuran Pemda diprosikan dengan nilai dari aset yang dimiliki Pemda tersebut.

$$\text{TA} = \ln (\text{total aset Pemda})$$

**Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian**

Variable	Keterangan	Ukuran	Arah Variabel
<b>SCORE</b>	Skor Kinerja Pemda	Skor Kinerja Pemda	
<b>OPINI</b>	Opini Audit	<i>Dummy</i> 1 untuk WTP dan WDP, sedangkan 0 untuk selain WTP dan WDP	+
<b>TEMUAN</b>	Temuan Audit	Temuan Audit (dalam rupiah)/total realisasi belanja	-
<b>GENDER</b>	<i>Gender</i>	<i>Dummy</i> 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki	?
<b>PAD</b>	Tingkat Kemandirian	Total PAD / Total Pendapatan	+
<b>TA</b>	Ukuran Pemda	Ln (Total Aset Pemda)	+

Sumber : Olah data Penulis

## 3.5 Pemilihan Sampel serta Sumber Data

### 3.5.1 Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 483 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2010, 471 Pemda pada tahun anggaran 2009, dan 452 Pemda pada tahun anggaran 2008. Keseluruhan pemerintah kabupaten/kota tersebut telah diaudit BPK. Tabel 3.2 menunjukkan proses pengambilan sampel pada penelitian ini.

Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel

Proses Pengambilan Sampel	Jumlah Pemda			Total
	2010	2009	2008	
Jumlah seluruh Pemda	483	471	452	<b>1406</b>
Data tidak tersedia	(152)	(6)	(16)	<b>(174)</b>
Data Pemda yang tersedia	331	465	436	<b>1232</b>
Data tidak lengkap	(27)	(52)	(20)	<b>(99)</b>
Data Pemda yang lengkap	304	413	417	<b>1134</b>
Data outlier	(7)	(18)	(27)	<b>(52)</b>
<b>Jumlah sampel akhir</b>	<b>297</b>	<b>395</b>	<b>390</b>	<b>1082</b>

Sumber : Olah data Penulis

### 3.5.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Opini dan Temuan Audit diperoleh dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2011, data LKPD, serta data yang diperoleh dari situs pemerintah daerah. Sedangkan untuk data variabel dependen diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemda Berdasarkan LPPD Tahun 2008 - 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## 3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka metode statistik parametrik tidak dapat digunakan dan harus digunakan metode statistik non-parametrik (Trihendradi, 2009). Uji normalitas dapat diukur menggunakan dua cara (Santoso, 2012), yaitu:

1. Membuat grafik histogram dari residual. Apabila kurva pada grafik histogram berbentuk menyerupai lonceng (*Bell-Shaped*), maka hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

2. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dari residual. Apabila *normal probability plot* menunjukkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinieritas (*Multicolinearity*)

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada di dalam model regresi. Dalam praktiknya, umumnya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi=0). Akan tetapi, ada multikolinieritas yang signifikan dan tidak signifikan (mendekati nol). Model penelitian yang baik memiliki multikolinieritas yang rendah sebab jika multikolinieritas tinggi maka model tidak bisa memisahkan efek parsial dari satu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya. Untuk melihat adanya multikolinieritas dengan melihat *correlation matrix* pada program SPSS, dimana korelasi antar variabel bebas kurang dari 0.8 (*rule of thumbs 0.8*) maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas.

Cara lain untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* <0,05 atau sama dengan nilai  $VIF > 5$  (Santoso, 2012).



## 2. Uji Heterokedastisitas (*Heterocedasticity*)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Gangguan heterokedastisitas sering muncul dalam data *cross section*, tetapi juga bisa terjadi pada data *time series*. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, maka varians tidak sama atau *error* tidak konsisten. *Error* yang diharapkan adalah variasinya seragam sehingga *error*-nya konsisten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dimana untuk uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai *overall percentage* pada tabel klasifikasi. Apabila *overall percentage* bernilai 100% maka model regresi mempunyai varians yang sama (homoskedastisitas).

## 3. Autokorelasi

Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi antara varians *error* suatu observasi dengan observasi lainnya. Hal ini dapat muncul ketika terdapat hubungan yang signifikan antara 2 data yang berdekatan. Biasanya gangguan ini muncul pada data *time series*. Gejala autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, jika nilai statistik DW berada diantara 1,54 hingga 2,46, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.

### 3.6.3 Uji Model Regresi

#### 1. Uji F-statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. Signifikansi dari uji F dapat dilihat dari F-statistik. Jika F-statistik lebih besar F-tabel, maka persamaan regresi tersebut signifikan. Suatu model dianggap signifikan jika nilai probabilitas *Prob.(FStatistic)* lebih kecil 5% karena itu nilainya semakin baik jika semakin rendah.

#### 2. Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya.  $R^2$  memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dimana bila semakin tinggi nilai  $R^2$ , suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti

bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependennya. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

- Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap kelompok data hasil observasi.
- Untuk mengukur proporsi varian dependen yang diterangkan oleh pengaruh linier dari variabel independen.

### 3. Uji T-statistik

Uji T-statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh variabel masing-masing independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitasnya. Jika *Prob.(t-Statistic)* lebih besar dari 0,05 maka terima  $H_0$  yang berarti tidak terdapat signifikansi. Sedangkan jika *Prob.(t-Statistic)* lebih kecil dari 0,05 maka tolak  $H_0$  yang berarti terdapat signifikansi pengaruh.

## BAB 4

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Statistik Deskriptif Sampel

Tabel 4.1 merupakan deskripsi variabel dependen, independen dan kontrol dari 1082 sampel dalam penelitian ini, yaitu Skor Hasil Evaluasi LPPD (yang selanjutnya disebut Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota), Opini audit, Temuan Audit, *Gender*, Tingkat Kemandirian dan Ukuran Pemda.

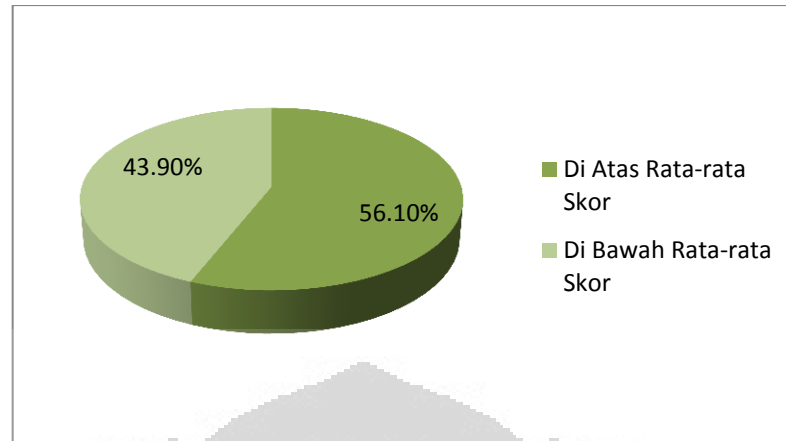
**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

<b>N = 1082</b>	<b>Mean</b>	<b>Maximum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Std. Dev.</b>
<b>Skor</b>	2,362	3,240	1,100	0,374
<b>Opini</b>	0,749	1,000	0,000	0,434
<b>Temuan</b>	0,005	0,360	0,000	0,025
<b>Gender</b>	0,048	1,000	0,000	0,214
<b>PAD/Total pendapatan</b>	0,067	0,690	0,002	0,059
<b>Aset (Triliun)</b>	1,805	32,621	0,036	0,669

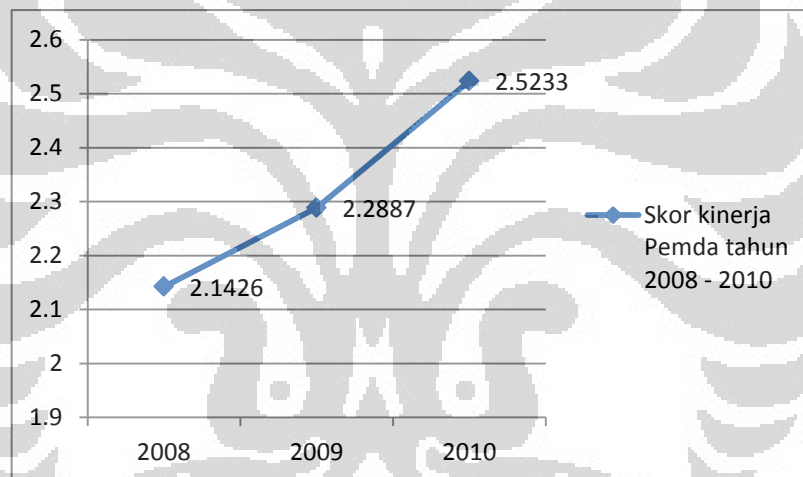
Sumber : olah data Eviews

##### 4.1.1 Variabel Dependen

Nilai rata-rata skor kinerja sebesar 2,362, berarti bahwa rata-rata skor kinerja Pemda sudah baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Terdapat 56,10% Pemda atau sebanyak 607 Pemda selama 2008 – 2010 memiliki skor kinerja di atas rata-rata. Pemda yang memiliki skor kinerja tertinggi pada penelitian ini adalah Kota Yogyakarta (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk tahun anggaran 2010.

**Gambar 4.1 Skor Kinerja Pemda**

Sumber : Data Olah Penulis

**Gambar 4.2 Skor Rata-rata Kinerja Tahun 2008 – 2010**

Sumber : Data Olah Penulis

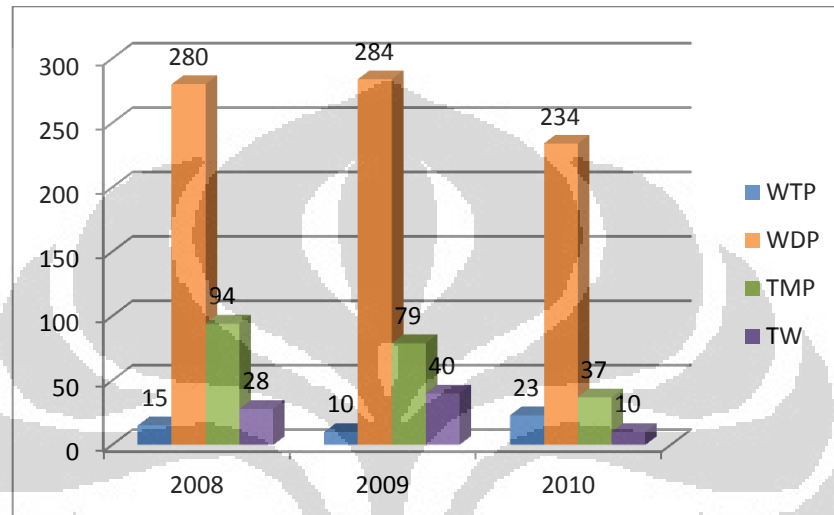
Berdasarkan Gambar 4.2 diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan rata-rata skor kinerja Pemda. Pada tahun 2008 rata-rata skor kinerja Pemda berada di titik 2.1426 sedangkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan rata-rata skor kinerja pada titik 2.2887 dan pada tahun 2010 rata-rata skor kinerja Pemda berada di tingkat tertinggi pada titik 2.5233. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kinerja Pemda dari tahun 2008 – 2010.

## 4.1.2 Variabel Independen

### 4.1.2.1 Opini Audit

Dari 1082 Pemda kabupaten/kota tahun 2008-2010, 811 Pemda atau sekitar 74,95% Pemda mendapatkan opini WTP dan WDP.

**Gambar 4.3 Sampel Perkembangan Opini Audit LKPD Tahun 2008 - 2010**



Sumber : Data Olah Penulis

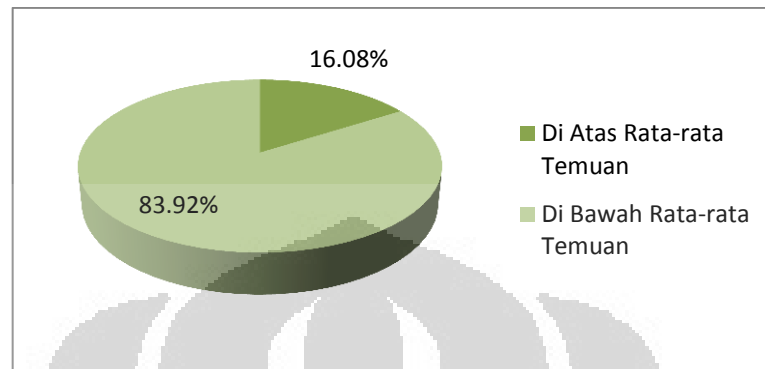
Dari Gambar 4.3 terhadap sampel yang digunakan peneliti dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan atas opini WDP dari tahun 2008 sampai 2009 dan turun pada tahun 2010 sedangkan untuk opini WTP dan opini TW terjadi penurunan dari tahun 2008 sampai 2009 kemudian meningkat di tahun 2010. Sedangkan opini TMP mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadinya perbaikan yang dilakukan oleh Pemda atas laporan keuangan tersebut. Peningkatan tersebut terjadi karena sudah banyak Pemda yang telah melakukan prosedur atas penyajian laporan keuangannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4.1.2.2 Temuan Audit

Untuk variabel temuan audit nilai rata-rata sebesar 0,005. Hal ini menandakan bahwa hanya sedikit temuan yang ditemukan oleh BPK terhadap LKPD Pemda. Dengan sedikitnya temuan tersebut, menandakan bahwa semakin baiknya Pemda dalam mengelola keuangannya. Pemda yang temuan auditnya tertinggi adalah kabupaten Waropen (Provinsi Papua) tahun 2008 sebesar 0,361.

Sedangkan Pemda yang temuan auditnya terendah adalah kabupaten Mappi (Provinsi Papua) sebesar 0,00001 pada tahun 2008 juga.

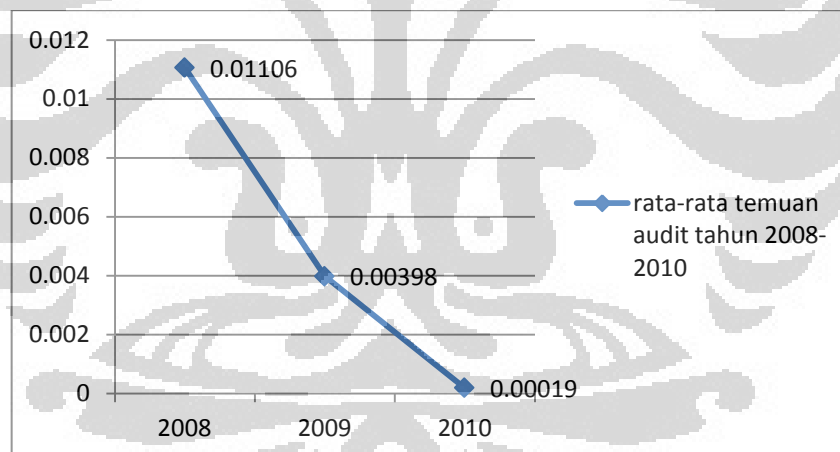
**Gambar 4.4 Temuan Audit**



Sumber : Data Olah Penulis

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, sekitar 16,08% atau sebanyak 174 Pemda yang memiliki temuan audit di atas rata-rata pada tahun 2008-2010.

**Gambar 4.5 Rata-rata Temuan Audit Tahun 2008 – 2010**



Sumber : Data Olah Penulis

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata temuan audit atas Pemda dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sudah semakin baiknya kinerja suatu Pemda dalam menjalankan kegiatannya.

### 4.1.2.3 Gender

Untuk variabel *gender* nilai rata-rata sebesar 0,048 yang artinya bahwa hanya sekitar 4,8% pemda kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang wanita selama tahun 2008-2010, dan sisanya dipimpin oleh seorang laki-laki selama tahun 2008-2010.

## 4.1.3 Variabel Kontrol

### 4.1.3.1 Tingkat Kemandirian Pemda

Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan Pemda adalah 0,067 atau sebesar 6,7%. Hal ini menandakan bahwa rata-rata porsi PAD pada pendapatan Pemda masih sangat kecil. Karena rasio PAD menggambarkan porsi pendapatan yang dapat dihasilkan sendiri oleh Pemda dibandingkan terhadap total pendapatan yang diterimanya, maka dengan kata lain tingkat kemandirian Pemda kabupaten/kota selama tahun 2008 – 2010 masih relatif kecil. Pemda yang memiliki porsi PAD terhadap total pendapatan terbesar adalah Kabupaten Badung (Provinsi Bali) untuk tahun 2010. Sedangkan, Pemda yang memiliki porsi PAD terhadap total pendapatan terendah adalah Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatra Utara) tahun 2008.

### 4.1.3.2 Ukuran Pemda

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki aset yang sangat bervariasi dan memiliki jangkauan yang sangat lebar. Daerah yang memiliki jumlah aset atau ukuran terbesar adalah Kota Surabaya (provinsi Jawa Timur) untuk tahun anggaran 2010, sedangkan daerah yang jumlah asetnya terkecil adalah kabupaten Subulussalam (Provinsi Aceh) untuk tahun anggaran 2008.

## 4.2 Uji Beda Rata-rata

Selanjutnya, peneliti ingin melakukan uji beda rata-rata nilai skor kinerja Pemda antara kelompok sampel untuk setiap variabel independen dan variabel kontrol. Dalam melakukan uji beda rata-rata ini, pembagian kelompok Pemda menggunakan data mean dari masing-masing variabel. Pemerintah daerah akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Pemda dengan rata-rata rendah (dibawah nilai mean) dan rata-rata tinggi (diatas nilai mean). Hasil uji beda rata-rata disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-rata

Variabel bebas	Rata-rata Skor Kinerja		Sig. t-test
	Kel. Rendah	Kel. Tinggi	
Temuan	2,4071	2,1226	0,000 *
Tingkat kemandirian	2,2606	2,5361	0,000 *
Ukuran	2,2571	2,4718	0,000 *
	Kel. TMP dan TW	Kel. WTP dan WDP	
Opini	2,1110	2,4451	0,000 *
	Laki-laki	Wanita	
Gender	2,3516	2,5564	0,000 *

Sumber : Olah Data SPSS

\*signifikan pada  $\alpha : 1\%$

Untuk variabel opini terdapat beda rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dari Tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa kelompok Pemda dengan rata-rata opini rendah (TMP dan TW) memiliki rata-rata skor kinerja yang rendah dibandingkan dengan kelompok Pemda dengan nilai rata-rata tinggi (WTP dan WDP). Hal ini mengindikasikan bahwa opini yang dikeluarkan auditor independen memiliki hubungan yang searah (positif) dengan skor kinerja.

Untuk variabel temuan audit terdapat beda rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dari data tersebut terlihat bahwa kelompok Pemda dengan rata-rata temuan audit rendah memiliki rata-rata skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Pemda dengan nilai rata-rata temuan audit yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa temuan audit memiliki hubungan negatif dengan skor kinerja.

Untuk variabel *gender* terdapat beda rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dari data tersebut terlihat bahwa pada kelompok Pemda dengan rata-rata *gender* rendah (laki-laki) memiliki rata-rata skor kinerja yang rendah dibandingkan dengan kelompok Pemda dengan nilai rata-rata *gender* yang tinggi (wanita).

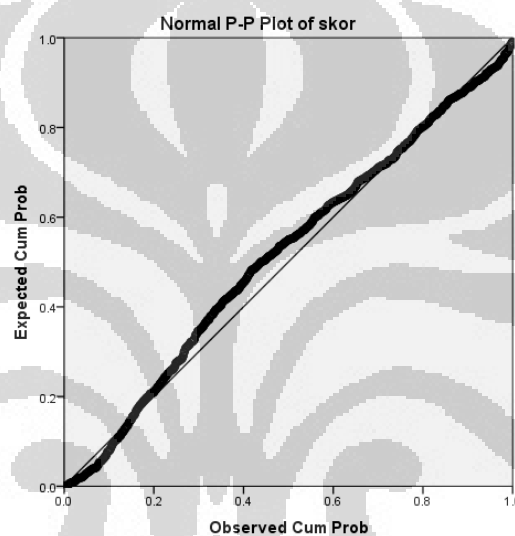
Begitu juga dengan kedua variabel kontrol yaitu tingkat kemandirian dan ukuran Pemda juga memiliki beda rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dari tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata tingkat



kemandirian dan ukuran Pemda memiliki hubungan yang searah (positif) dengan skor kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa pemerintah daerah dengan nilai rata-rata tingkat kemandirian dan ukuran Pemda rendah memiliki rata-rata skor kinerja rendah dibandingkan kelompok Pemda dengan tingkat kemandirian dan ukuran Pemda yang tinggi.

### 4.3 Uji Normalitas

**Gambar 4.6 Uji Normalitas**



Sumber : Olah Data SPSS

Berdasarkan Gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa data penelitian memiliki penyebaran dan distribusi yang normal karena data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai plot PP terletak digaris diagonal, maka dapat dikatakan bahwa distribusi data SKOR adalah normal.

### 4.4 Uji Asumsi Klasik

#### 4.4.1 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance* atau matriks korelasi. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dianggap terjadi jika nilai VIF  $> 5$ . Begitu pula untuk nilai *Tolerance*, jika nilainya adalah mendekati 1 berarti antar variabel bebas tidak berkorelasi, sedangkan jika nilai *Tolerance* adalah mendekati 0 berarti terjadi korelasi

sempurna. Berdasarkan data pada Tabel 4.3, nilai VIF lebih kecil dari 5 dan nilai *Tolerance* mendekati 1 (tidak sama dengan 0). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

**Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
OPINI	0,920	1,087
TEMUAN	0,945	1,058
GENDER	0,983	1,018
PAD	0,821	1,218
TA	0,798	1,253

Sumber : Olah data SPSS

Sedangkan pada Tabel 4.4 dapat kita lihat matriks korelasi yang dapat digunakan untuk melihat indikasi multikolinearitas. Adanya indikasi multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai korelasi yang melebihi 0,8. Namun dari Tabel 4.4 tersebut tidak terdapat nilai yang melebihi 0,8 maka dengan demikian tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model penelitian.

**Tabel 4.4 Matriks Korelasi**

	SKOR	OPINI	TEMUAN	GENDER	PAD	TA
SKOR	1,000					
OPINI	0,391	1,000				
TEMUAN	-0,225	-0,198	1,000			
GENDER	0,118	0,070	-0,038	1,000		
PAD	0,268	0,177	-0,079	0,039	1,000	
TA	0,354	0,192	-0,157	0,120	0,409	1,000

Sumber : Olah data Eviews

#### 4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *White* (*White Heteroskedasticity Test*). Pengujian dilakukan terhadap model dengan  $\alpha = 5\%$ . Bila *P-Value*  $< \alpha$ , maka terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output tes *white* pada model penelitian, dengan tingkat keyakinan 95% tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas karena *P-Value*  $> 0,05$ . Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

*White Heteroskedastisitas test :*

F-statistic	1,524570	Prob. F(18,1063)	0,0736
Obs*R-squared	27,22981	Prob. Chi-square(18)	0,0748
Scaled explained SS	27,41069	Prob. Chi-square(18)	0,0716

Sumber : Olah data Eviews

#### 4.4.3 Uji Auto Korelasi

Pada penelitian ini peneliti tidak melakukan pengujian terhadap uji auto korelasi, karena pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan data *time series* melainkan menggunakan data *cross section*.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Tabel 4.6 merupakan ringkasan hasil pengujian model penelitian dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* pada program aplikasi Eviews. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai koefisien, *standard error*, nilai t-statistik, dan probabilitasnya untuk setiap variabel independen. Terdapat juga nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*), F-statistik dan probabilitasnya untuk melihat model secara keseluruhan.

Tabel 4.6 Ringkasal Hasil Uji Regresi

Variabel	Hipotesis	Koefisien	t-statistik	Prob.
C		-1,429	-3,122	0,001
Opini	+	0,257	11,028	0,000 *
Temuan	-	-1,788	-4,441	0,000 *
Gender	?	0,105	2,296	0,021 **
Pad	+	0,687	3,819	0,000 *
Ta	+	0,127	7,669	0,000 *
<i>Adjusted R-square</i>		0,2579		
F-statistik		76,153		
Prob. (F-statistik)		0,000		

Sumber : Olah Data Eviews

\*Signifikan pada  $\alpha = 1\%$

\*\* Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

#### 4.5.1 Uji Signifikansi Serentak (F-test)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai  $Prob(F-statistic)$  dengan nilai  $\alpha$ . Jika nilai  $Prob(F-statistic)$  lebih kecil dari  $\alpha$  berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.  $Prob(F-statistic)$  pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari opini auditor, temuan audit, *gender*, tingkat kemandirian, dan ukuran Pemda secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

#### 4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $Adjusted R^2$ )

Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen. Nilai  $Adjusted R^2$  pada Tabel 4.6 sebesar 25,79%. Hal ini berarti 25,79% variasi skor kinerja Pemda kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh opini audit, temuan audit, *gender*, tingkat kemandirian dan ukuran Pemda. Dengan demikian 74,21% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (t-test)

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Jika nilai *prob t-sig* lebih kecil dari nilai  $\alpha$  berarti variabel bebas individual berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai *prob t-sig* lebih besar dari nilai  $\alpha$  berarti variabel bebas individual tidak berpengaruh signifikan. Tabel 4.6 memaparkan hasil regresi linear berganda terhadap model untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 serta untuk menguji variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) dalam penelitian ini.

#### 4.5.3.1 Variabel Independen

##### 1. Opini Audit

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah “Pemda dengan opini WTP dan WDP akan memiliki skor kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda yang mendapatkan opini selain WTP dan WDP”. Berdasarkan pada Tabel 4.6 nilai *t-sig* untuk variabel opini adalah 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 1\%$ . Opini audit berpengaruh positif **signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu pemda dengan opini WTP dan WDP memiliki skor kinerja yang lebih baik dibandingkan Pemda yang mendapat opini selain WTP dan WDP.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.* (2009) dan Meiden (2008) yang menyimpulkan bahwa opini berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

##### 2. Temuan Audit

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah “Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota”. Berdasarkan pada data Tabel 4.6 nilai *t-sig* untuk variabel temuan audit adalah 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini berarti temuan audit berpengaruh negatif **signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Dengan kata lain, hipotesis 2 pada penelitian ini diterima

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) yang menyimpulkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif

signifikan terhadap skor kinerja Pemda, dimana semakin tinggi jumlah temuan audit suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut.

### 3. Gender

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah “*Gender* berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda”. Berdasarkan pada data Tabel 4.6 nilai *t-sig* untuk variabel *gender* adalah 0,021 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti *gender* berpengaruh **signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 95%. Nilai koefisien untuk variabel *gender* menunjukkan 0,105. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 diterima yaitu *gender* berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda. Dalam variabel *gender* ini arah yang ditunjukkan adalah positif, artinya Pemda yang dipimpin oleh wanita memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda yang dipimpin oleh laki-laki.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanani (2009), Riniwati (2008) dan Hamidah (2011) menyimpulkan bahwa *gender* berpengaruh terhadap kinerja manajer.

#### 4.5.3.2 Variabel Kontrol

##### 1. Tingkat Kemandirian Pemda

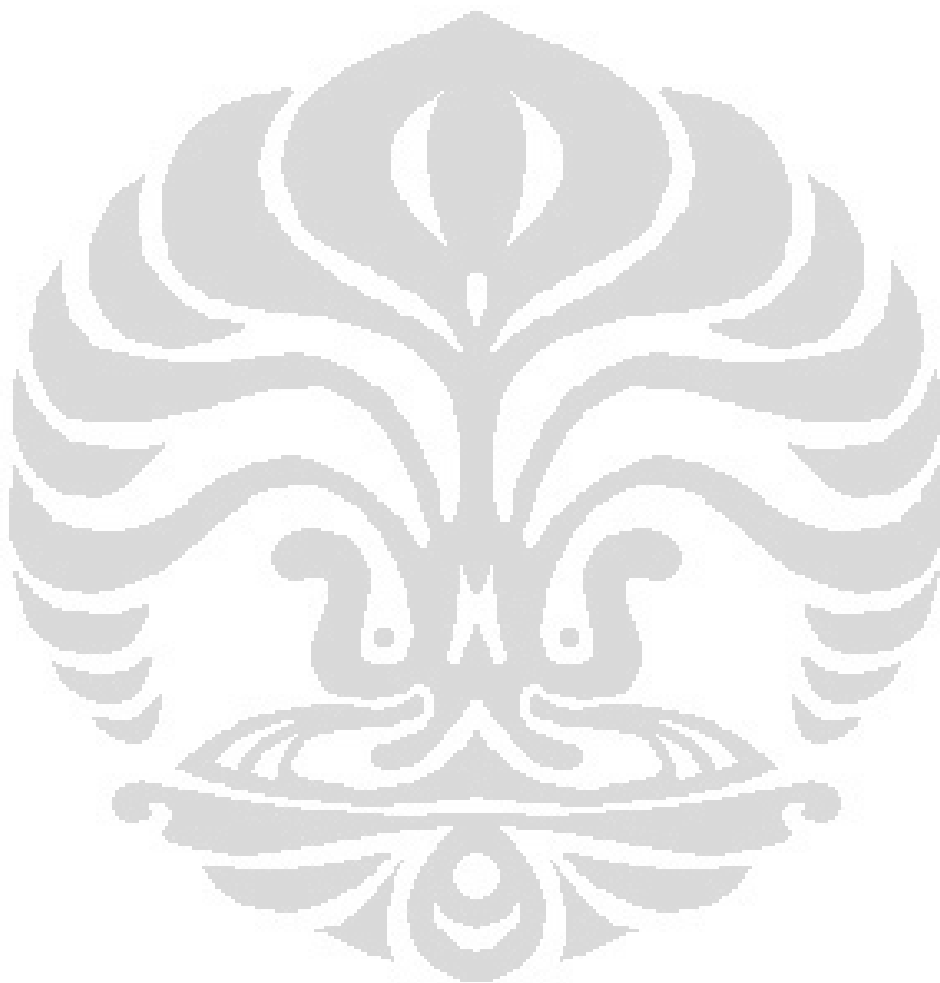
Berdasarkan pada Tabel 4.6 nilai *t-sig* untuk variabel tingkat kemandirian adalah 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini berarti tingkat kemandirian berpengaruh positif **signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin baik pula kinerja Pemda. Dengan kata lain, semakin mandiri suatu Pemda maka kinerjanya semakin baik.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Lin *et. al.* (2010) di Cina dan Mustikarini (2012) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

##### 2. Ukuran Pemda

Berdasarkan pada Tabel 4.6 nilai *t-sig* untuk variabel ukuran Pemda adalah 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif **signifikan** terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Semakin besar ukuran suatu Pemda maka semakin baik kinerja Pemda tersebut.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010) dan Mustikarini (2012) menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa opini auditor (BPK), temuan audit, dan *gender* terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008 – 2010. Berikut adalah kesimpulan atas hasil penelitian ini.

1. Opini auditor berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atau WDP akan mendapatkan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini TW dan TMP.
2. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semakin besar temuan audit yang dimiliki suatu Pemda maka akan semakin kecil skor kinerja dari Pemda tersebut.
3. *Gender* berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Berdasarkan penelitian ini, Pemda dengan wanita sebagai pemimpinnya memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda yang dipimpin oleh laki-laki sebagai pemimpinnya.
4. Untuk variabel kontrol berupa tingkat kemandirian Pemda dan ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008 – 2010.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk penelitian selanjutnya**

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dari hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah :

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya menguji pada tingkat kabupaten dan kota saja. Penelitian berikutnya bisa menggunakan data Pemda pada tingkat provinsi.
2. Variabel independen dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan atau menjelaskan sebagian kecil dari variabel



dependen. Dan sisanya dapat diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, penelitian berikutnya bisa menggunakan variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja, misalnya *leverage*, tingkat kemakmuran, jumlah penduduk atau jumlah pegawai.

3. Penelitian ini menggunakan data *cross section*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel, sehingga dapat melihat kemungkinan hasil pengujian yang berbeda jika unsur *time series* dimasukkan.
4. Dalam penelitian ini variabel temuan audit diukur dengan menggunakan hasil temuan berupa nilai temuan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel temuan audit berupa jumlah kasusnya.



## DAFTAR REFERENSI

- Amikawati, Anik. (2008). *Analisis Gender Pada Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2004 - 2009*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arens, Alvins. A. (2008). *Auditing and Assurance Services : An Intergated Approach*. Ed. 12th. Pearson Education : USA.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2008*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 10 mei 2012.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2009*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 20 mei 2012.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2010*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 10 mei 2012.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 10 mei 2012.
- Budiarta, Ketut. (2008). *Menelusuri Opini Auditor Independen Atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Cahya, Anggi Meliantha (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FE UNIKOM. Bandung.
- Chung, James. and Monroe, Gary. S. (2001). *A Research Note on The Effect of Gender and Task Complexity on Audit Judgment*. Journal of Behavioral Reserch. 13 : 111-125.
- Coll, Maria Teresa Balaguer., Prior, Diego., Ausina, Emili Tortosa. (2006). On the determinants of local government performance : A two-stage nonparametric approach. *European Economic Review (2007)* , 425-451.
- Dalimunthe, Tigor Mulia. (2010). *Review Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Dhuanovawati, Morgan. (2010). *Analisis atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

- Fakih, Mansour. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Social*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hamidah, Choirul. (2011). *Analisi Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Organisasi, Evaluasi Kinerja, Dan hasil Akhir*. Prodi Ekonomi Pembangunan FE-UMP.
- Hanani, Famera. (2009). *Pengaruh Gender Dewan Komisaris, Gender Dewan Direksi, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008)*.
- Handayani, Atlah. (2009). *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Irwanti, Ajeng Nurdiyani. (2011). *Penagruf Gender dan Tekanan Ketaatan Terhadap Audit Judgment, Kompleksitas Tugas Sebagai Variabel Moderating (studi pada auditor yang bekerja di BPKP perwakilan provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana. FE UNDIP. Semarang.
- Jamilah, Siti., Fanani, Zaenali., & Chandrarin, Grahita. (2007). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Simposium Nasional Akuntansi 10 Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2008-2010 Tingkat Nasional*.
- Kompasiana. *Perempuan Pemimpin Daerah ; Lebih Berhasil?*. <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 3 Juni 2012.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinichi. 2004. *Organizational Behavior*, 6th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Li, Yang., Stokes, Donald., Taylor, Stephen., Wong, Leon. (2009). *Audit Quality, Earnings Quality and the Cost of Equity Capital*.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., & Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying integrated DEA/AHP to evaluate the economic performance of local government in China. *European Journal of Operational Research* , 209 (2011) 129-140.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1* , Hal 1-17.

- Meiden, Carmel. (2008). Pengaruh Opini Audit Terhadap Return dan Volume Perdagangan Saham. *Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Maret 2008*, 109-113.
- Meyers-Levy, J. 1986. Gender difference in information processing : A selectivity interpretation. In *Cognitive and Affective Response to Advertising*, edited by P.Calfferata, and A.M. Tybout. Lexington.
- Mustikarini, Widya Astuti. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Narsa, I Made. (2006). *Sex-Role Stereotype dalam Rekrutmen Pegawai Akuntansi dan Keuangan : Observasi terhadap Pola Rekrutmen Terbuka di Media Masa*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8, No. 2. Nopember 2006, Hal 99-106.
- Palmer, G. and Kandasami, T. (1997). Gender in Management: A Sociological Perspective, *The international Journal of Accounting and Business Society*, Agust, (5).1. pp. 67-99.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemrintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

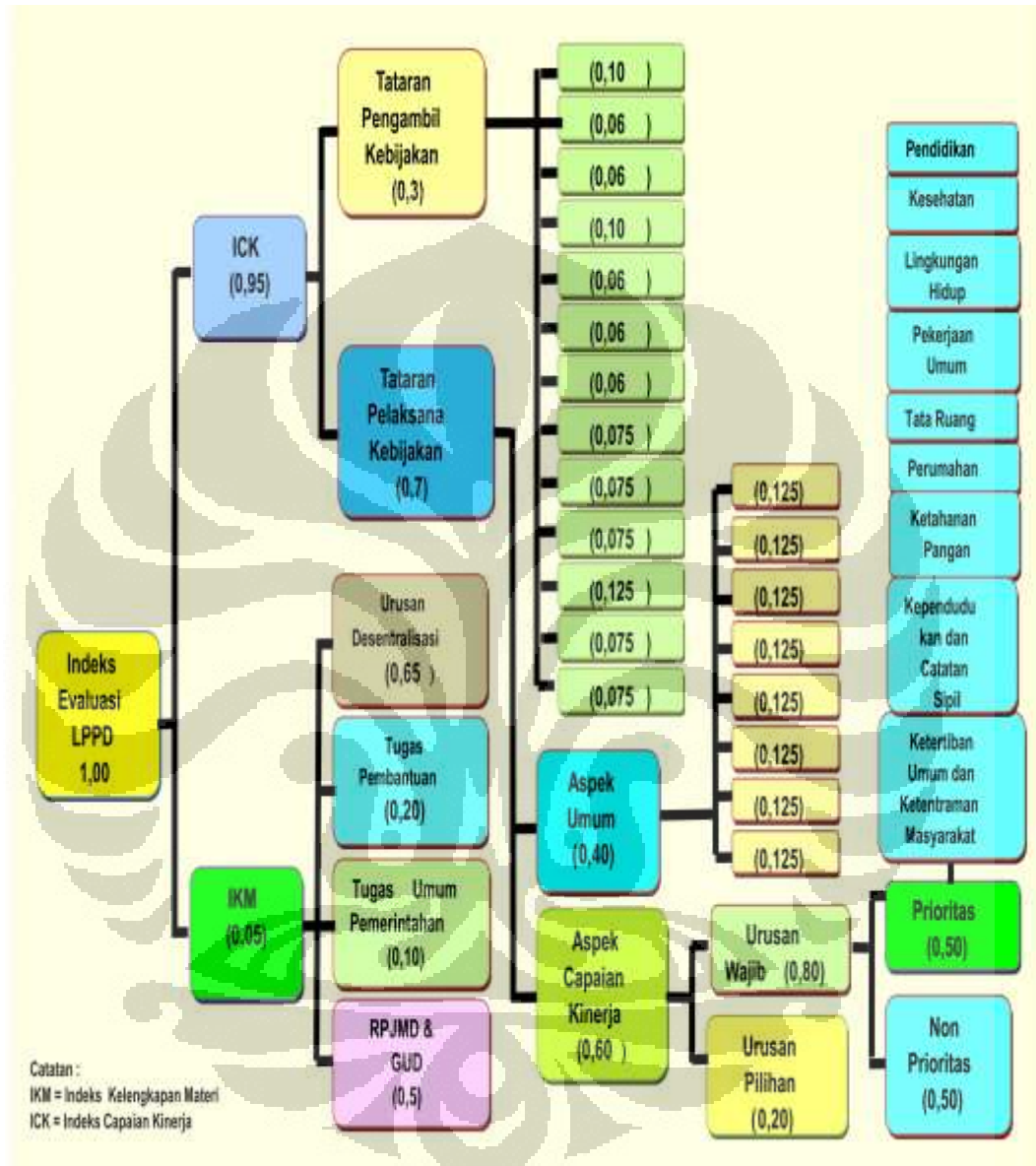
- Puspitasari, Rahmi Ayu. (2011). *Analisi Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor terhadap Kinerja Auditor Dalam Pembuatan Audit Judgment*. Skripsi Sarjana. FE UNDIP. Semarang.
- Riniwati, Harsuko. (2008). *Pengaruh Tingkat PEMBERDAYAAN Manajer Wanita Terhadap Kinerja Manajer pada Perusahaan Perikanan di Jawa Timur*. Jurnal Penelitian Akuntansi Perikanan, Vol. 11, Nomor 1, Juni 2008 : Hal. 94-98.
- Rusydi, Bahrul Ulum. (2010). *Analisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan deteksi ilusi fiskal (studi kasus provinsi di Indonesia tahun 2005-2008)*. Skripsi Sarjana. FE UNDIP. Semarang.
- Sadjiarto, Arja. (2000). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol. 2 No. 2 Nopember 2000 , 138-150.
- Santoso, Singgih. (2012). *Aplikasi SPSS 20 pada Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2012.
- Sari, Vita Fitria; Rasyid, Eddy R; Firdaus;. (2010). *Studi Ekspolratif Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten/kota yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Menggunakan Content Analysis*. *Simposium Nasional Akuntansi 13 Purwokerto 2010* .
- Setiawati, Devi. (2009). *Perbedaan Komitmen Kerja Berdasarkan Orientasi Peran Gender*. Skripsi Sarjana. Universitas Gunadarma.
- Sifajaya, Mulitia. (2011). *Pengaruh Gender dan Pengalaman Auditor Terhadap Skeptisme Profesional Auditor*. Skripsi Sarjana. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Trihendradi, Cornelius. (2008). *Step By Step SPSS Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Universitas Indonesia. (2008). Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Depok
- Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Zaelani, Fazri. (2010). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Zulaikha. (2006). *Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgment (sebuah kajian eksperimental dalam audit saldo akun persediaan)*. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.



## Lampiran 1

**Bagan bobot dan komponen EKPPD berdasarkan LPPD dan/atau suplemen LPPD**



Sumber : Sosialisasi Manual EKPPD Tahun Anggaran 2008

## Lampiran 2

## Daftar Sampel Pemda

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
	Provinsi Aceh			
1	kab aceh barat	v	v	v
2	kab aceh barat daya	v	v	v
3	kab aceh besar	v	v	v
4	kab aceh jaya	v	v	
5	kab aceh selatan	v	v	
6	kab aceh singkil	v	v	
7	kab aceh tamiang	v	v	v
8	kab aceh tengah	v	v	v
9	kab aceh tenggara	v	v	
10	kab aceh timur	v	v	
11	kab aceh utara	v	v	
12	kab bener meriah	v	v	
13	kab bireun	v	v	
14	kab gayo lues	v	v	v
15	kab pidie	v	v	
16	kab simeulue	v	v	
17	kota banda aceh	v	v	v
18	kota langsa	v	v	
19	kota lhokseumawe	v	v	
20	kota sabang	v	v	v
	Provinsi Sumatera Utara			
21	kab asahan	v	v	v
22	kab deli serdang	v	v	v
23	kab dairi	v	v	v
24	kab humbang hasudutan	v	v	v
25	kab karo	v	v	v
26	kab labuhan batu	v	v	v
27	kab langkat	v	v	v
28	kab mandailing natal	v	v	v
29	kab nias	v	v	
30	kab nias selatan	v	v	
31	kab pakpak Bharat	v	v	v
32	kab samosir	v	v	v
33	kab. serdang berdagai	v	v	v
34	kab simalungun	v	v	v
35	kab tapanuli selatan	v	v	v



No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
36	kab tapanuli tengah	v	v	
37	kab tapanuli utara	v	v	v
38	kab toba samosir	v	v	
39	kota binjai	v	v	v
40	kota medan	v	v	v
41	kota padang sidempuan	v	v	v
42	kota pematang siantar	v	v	v
43	kota sibolga	v	v	
44	kota tanjung balai	v	v	v
45	kota tebing tinggi	v	v	v
	Provinsi Sumatera Barat			
46	kab agam	v	v	v
47	kab dharmasraya	v	v	
48	kab kep mentawai		v	
49	kab lima puluh kota	v	v	
50	kab padang pariaman	v	v	v
51	kab pasaman		v	v
52	kab pasaman barat	v	v	
53	kab pesisir selatan	v	v	v
54	kab sijunjung	v	v	v
55	kab solok	v	v	v
56	kab solok selatan	v	v	
57	kota bukittinggi	v	v	v
58	kota padang panjang	v	v	v
59	kota pariaman	v	v	v
60	kota payakumbuh	v	v	v
61	kota sawahlunto	v	v	v
62	kota solok	v	v	
	Provinsi Riau			
63	kab bengkalis	v	v	
64	kab indragiri hilir	v	v	
65	kab Indragiri hulu	v	v	
66	kab kampar	v	v	v
67	kab kuantan singingi	v	v	v
68	kab pelalawan	v	v	
69	kab rokan hilir	v	v	
70	kab rokan hulu	v	v	v
71	kab siak			v
72	kota dumai	v	v	
73	kota pekanbaru	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
	Provinsi Jambi			
74	kab batang hari	v	v	v
75	kab bungo	v	v	v
76	kab kerinci	v	v	v
77	kab merangin	v	v	
78	kab muaro jambi	v	v	
79	kab sarolangun	v	v	v
80	kab tanjung jabung barat	v	v	
81	kab tanjung jabung timur	v	v	
82	kab tebo	v	v	v
83	kota jambi	v	v	v
	Provinsi Sumatera Selatan			
84	kab. Banyuasin	v	v	
85	kab lahat	v	v	v
86	kab muara enim	v	v	v
87	kab musibanyuasin	v	v	v
88	kab musirawas	v	v	v
89	kab ogan ilir	v	v	v
90	kab ogan komering ilir	v	v	v
91	kab. Ogan komering Ulu	v	v	v
92	kab ogan komering ulu selatan	v	v	v
93	kab ogan komering ulu timur	v	v	v
94	kota lubuklinggau	v	v	v
95	kota pagaralam	v	v	v
96	kota Palembang	v	v	v
97	kota Prabumulih	v	v	v
	Provinsi Bengkulu			
98	kab. Bengkulu selatan	v	v	v
99	kab Bengkulu utara	v	v	v
100	kab kaur	v	v	v
101	kab. kepahiang	v	v	v
102	kab. Lebong	v	v	v
103	kab mukomuko	v	v	v
104	kab rejang Lebong	v	v	v
105	kab seluma	v	v	v
106	kota Bengkulu	v	v	v
	Provinsi Lampung			
107	kab Lampung barat	v	v	v
108	kab Lampung selatan	v	v	v
109	kab. Lampung tengah	v	v	v
110	kab Lampung timur	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
111	kab lampung utara	v	v	v
112	kab tanggamus	v	v	
113	kab tulang bawang	v	v	v
114	kab way kanan	v	v	v
115	kota bandar lampung	v	v	v
116	kota metro	v	v	v
	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>			
117	kab bangka	v	v	v
118	kab bangka barat	v	v	v
119	kab bangka selatan	v	v	v
120	kab bangka tengah	v	v	v
121	kab belitung	v	v	v
122	kab belitung timur	v	v	v
123	kota pangkalpinang	v	v	v
	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>			
124	kab bintan	v	v	v
125	kab karimun	v	v	v
126	kab natuna	v	v	v
127	kota batam	v	v	
128	kota tanjungpinang	v	v	v
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
129	kab bandung	v	v	v
130	kab bekasi	v	v	v
131	kab bogor		v	v
132	kab ciamis	v	v	v
133	kab. cianjur	v	v	v
134	kab Cirebon		v	v
135	kab garut	v	v	v
136	kab indramayu	v	v	v
137	kab karawang	v	v	v
138	kab kuningan	v	v	v
139	kab majalengka	v	v	v
140	kab purwakarta	v	v	v
141	kab subang	v	v	v
142	kab sukabumi	v	v	v
143	kab sumedang	v	v	v
144	kab tasikmalaya	v	v	v
145	kota bandung	v	v	v
146	kota banjar			v
147	kota bekasi	v	v	v
148	kota bogor	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
149	kota cimahi	v	v	v
150	kota cirebon	v	v	v
151	kota depok	v	v	v
152	kota sukabumi	v	v	v
153	kota tasikmalaya	v	v	v
	Provinsi Jawa Tengah			
154	kab banjarnegara	v	v	v
155	kab. Banyumas	v	v	v
156	kab. Batang	v	v	v
157	kab blora	v	v	v
158	kab boyolali	v	v	v
159	kab brebes	v	v	v
160	kab cilacap	v	v	v
161	kab demak	v	v	
162	kab grobogan	v	v	v
163	kab jepara	v	v	v
164	kab karanganyar	v	v	v
165	kab kebumen	v	v	v
166	kab Kendal	v	v	v
167	kab klaten	v	v	v
168	kab kudus	v	v	v
169	kab magelang	v	v	v
170	kab pati	v	v	v
171	kab pekalongan	v	v	v
172	kab pемalang	v	v	v
173	kab purbalingga	v	v	v
174	kab purworejo	v	v	v
175	kab rembang	v	v	v
176	kab semarang	v	v	v
177	kab sragen	v	v	v
178	kab sukoharjo	v	v	v
179	kab. Tegal	v	v	v
180	kab temanggung	v	v	v
181	kab wonogiri	v	v	v
182	kab wonosobo	v	v	v
183	kota magelang	v	v	v
184	kota pekalongan	v	v	v
185	kota salatiga	v	v	v
186	kota semarang	v	v	v
187	kota Surakarta	v	v	v
188	kota tegal	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
	Provinsi D.I. Yogyakarta			
189	kab bantul	v	v	v
190	kab gunungkidul	v	v	v
191	kab kulon progo	v	v	v
192	kab sleman	v	v	v
193	kota Yogyakarta	v	v	v
	Provinsi Jawa Timur			
194	kab bangkalan	v	v	v
195	kab. Banyuwangi	v	v	v
196	kab blitar	v	v	v
197	kab. Bojonegoro	v	v	v
198	kab bondowoso	v	v	v
199	kab gresik	v	v	v
200	kab. Jember	v	v	v
201	kab jombang	v	v	v
202	kab Kediri	v	v	v
203	kab lamongan	v	v	v
204	kab lumajang	v	v	v
205	kab madiun	v	v	v
206	kab magetan	v	v	v
207	kab malang	v	v	v
208	kab Mojokerto	v	v	v
209	kab nganjuk	v	v	v
210	kab ngawi	v	v	v
211	kab pacitan	v	v	v
212	kab pamekasan	v	v	v
213	kab. pasuruan	v	v	v
214	kab. ponorogo	v	v	v
215	kab probolinggo	v	v	v
216	kab. sampang	v	v	v
217	kab. sidoarjo	v	v	v
218	kab. situbondo	v	v	v
219	kab sumenep	v	v	v
220	kab .trenggalek	v	v	v
221	kab tuban	v	v	v
222	kab tulungagung	v	v	v
223	kota batu	v	v	v
224	kota blitar	v	v	v
225	kota kediri	v	v	v
226	kota madiun	v	v	v
227	kota malang	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
228	kota Mojokerto	v	v	v
229	kota Pasuruan	v	v	v
230	kota Probolinggo	v	v	v
231	kota Surabaya	v	v	v
	<b>Provinsi Banten</b>			
232	kab Lebak	v	v	v
233	kab Pandeglang	v	v	v
234	kab Serang	v	v	v
235	kab Tangerang	v	v	v
236	kota Cilegon	v	v	v
237	kota Tangerang	v	v	v
	<b>Provinsi Bali</b>			
238	kab. Badung	v	v	v
239	kab Bangli	v	v	v
240	kab Buleleng	v	v	v
241	kab Gianyar	v	v	v
242	kab Jembrana	v	v	v
243	kab Karangasem	v	v	v
244	kab Klungkung	v	v	v
245	kab Tabanan	v	v	v
246	kota Denpasar	v	v	v
	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
247	kab Bima	v	v	v
248	Kab Dompu	v	v	v
249	kab Lombok Barat	v	v	v
250	kab Lombok Tengah	v	v	v
251	kab Lombok Timur	v	v	v
252	kab Sumbawa	v	v	v
253	kab Sumbawa Barat	v	v	v
254	kota Bima	v	v	v
255	kota Mataram	v	v	v
	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
256	kab Alor	v	v	
257	kab Belu	v	v	v
258	Kab Ende			v
259	kab Kupang		v	
260	kab Lembata	v	v	
261	kab Manggarai	v	v	
262	kab Manggarai Timur	v	v	
263	kab Ngada	v	v	v
264	kab Rote Ndao	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
265	kab sumba barat	v	v	v
266	kab sumba timur	v	v	
267	kab timor tengah selatan	v	v	
268	kab timor tengah utara	v	v	
269	kota kupang		v	v
	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>			
270	kab bengkayang	v	v	
271	kab kapuas hulu	v	v	
272	kab. Ketapang	v	v	v
273	kab landak	v	v	
274	kab melawi	v	v	
275	kab pontianak	v	v	v
276	kab sambas	v	v	v
277	kab sanggau	v	v	v
278	kab sekadau	v	v	
279	Kab sintang	v	v	
280	kota pontianak	v	v	v
281	kota singkawang	v	v	v
	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
282	kab barito selatan	v	v	v
283	kab barito timur	v	v	
284	kab barito utara	v	v	v
285	kab gunung mas	v	v	
286	kab. kapuas	v	v	v
287	kab katingan	v	v	
288	kab kotawaringin barat	v	v	v
289	kab kotawaringin timur	v	v	v
290	kab lamandau	v	v	
291	kab murung raya	v	v	
292	kab pulang pisau	v	v	v
293	kab seruyan	v	v	v
294	kab. sukamara	v	v	v
	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
295	kab balangan	v	v	
296	kab banjar	v	v	
297	kab barito kuala	v	v	
298	Kab. Hulu Sungai Selatan	v	v	v
299	kab. Hulu Sungai Tengah	v	v	
300	Kab. Hulu Sungai Utara	v	v	v
301	kab tabalong	v	v	
302	kab. Tanah Bumbu	v	v	

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
303	Kab. Tanah Laut	v	v	v
304	Kab. Tapin	v	v	v
305	kota banjarbaru	v	v	v
306	kota banjarmasin	v	v	v
	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>			
307	kab. berau	v	v	v
308	kab kutai barat	v	v	v
309	kab kutai kartanegara	v	v	
310	kab kutai timur	V	v	
311	kab malinau	v	v	
312	kab nunukan	v	v	v
313	kab paser	v	v	v
314	kab paser penajem utara	v	v	
315	kota balikpapan	v	v	v
316	kota Bontang	v	v	
317	kota Samarinda	v	v	
318	Kota Tarakan	v	v	v
	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>			
319	kab bolaang mongondow	v	v	
320	kab kepulauan sangihe	v	v	
321	kab kepulauan talaud	v	v	
322	kab minahasa	v	v	
323	kab minahasa selatan	v	v	
324	kab minahasa utara	v	v	
325	kota bitung	v	v	
326	kota manado	v	v	
327	kota tomohon	v	v	
	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
328	Kab. Banggai	v	v	v
329	kab Banggai kepulauan	v	v	v
330	kab buol	v	v	v
331	kab donggala	v	v	v
332	kab morowali	v	v	v
333	kab parigi moutong		v	v
334	kab poso		v	v
335	Kab. Tojo Una-Una	v	v	v
336	kab. toli-toli		v	v
337	kota palu	v	v	v
	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
338	kab bantaeng	v	v	
339	kab barru	v	v	



No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
340	Kab. Bone	v	v	v
341	Kab. Bulukumba	v	v	v
342	Kab. Enrekang	v	v	v
343	Kab. Gowa	v	v	v
344	kab Jeneponto	v	v	
345	kab kep selayar	v	v	
346	kab Luwu	v	v	
347	Kab. Luwu Timur	v	v	v
348	kab. Luwu Utara	v	v	
349	kab maros	v	v	v
350	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	v	v	v
351	Kab. Pinrang	v	v	v
352	Kab. Sidenreng Rappang	v	v	v
353	kab sinjai	v	v	
354	kab soppeng	v	v	
355	kab takalar	v	v	
356	Kab. Tana Toraja	v	v	v
357	Kab. Wajo	v	v	v
358	kota makassar	v	v	
359	kota palopo	v	v	v
360	kota pare-pare	v	v	
	Provinsi Sulawesi Tenggara			
361	kab bombana	v	v	
362	Kab. Buton	v	v	v
363	kab. Kolaka	v	v	v
364	kab. Kolaka Utara	v	v	
365	kota kendari	v	v	
366	kab konawe selatan	v	v	
367	kab muna	v	v	
368	kab wakatobi	v	v	
369	kota bau-bau	v	v	v
	Provinsi Gorontalo			
370	Kab. Boalemo	v	v	v
371	kab. bone bolango	v	v	v
372	Kab. Gorontalo			v
373	Kab. Pohuwato		v	v
374	kota gorontalo	v	v	v
	Provinsi Sulawesi Barat			
375	Kab. Mamuju	v	v	v
376	kab. mamasa	v	v	v
377	kab. mamuju utara	v	v	v

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
378	Kab. Polewali Mandar	v	v	v
	Provinsi Maluku			
379	kab buru	v	v	
380	kab maluku tengah	v	v	v
381	kab maluku tenggara	v	v	v
382	kab maluku tenggara barat	v	v	v
383	kab seram bagian barat			v
384	kota ambon	v	v	
	Provinsi Maluku Utara			
385	kab halmahera selatan	v	v	v
386	kab halmahera tengah	v	v	
387	kab halmahera timur	v	v	
388	kab halmahera utara		v	v
389	kab kepulauan sula		v	
390	kota ternate	v	v	v
391	kota tidore kepulauan	v	v	
	Provinsi Papua			
392	kab. asmat	v	v	v
393	kab biak numfor	v	v	v
394	kab boven digoel	v	v	v
395	kab jayapura	v	v	v
396	kab jayawijaya	v	v	
397	kab keerom	v	v	
398	kab kepulauan yappen	v	v	
399	kab mappi	v	v	v
400	kab merauke	v	v	
401	kab mimika	v	v	
402	kab nabire	v	v	
403	kab paniai	v	v	
404	kab pegunungan bintang	v	v	v
405	kab puncak jaya	v	v	v
406	kab sarmi	v	v	
407	kab supiori		v	
408	kab tolikara		v	
409	kab waropen	v	v	
410	kab yahukimo	v	v	
411	kota jayapura	v	v	
	Provinsi Papua Barat			
412	kab fakfak	v	v	
413	kab kaimana	v	v	
414	kab manokwari		v	

No	Pemerintah Daerah	2008	2009	2010
415	kab raja ampat	v	v	
416	kab sorong	v	v	
417	kab sorong selatan	v	v	
418	kota sorong	v	v	v

